

FENOMENOLOGI POLITIK ;

**Deskripsi Fenomenologis Atas Konsep Kekuasaan Dalam Filsafat
Politik Aristoteles**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin**



Oleh :

MUCHAMMAD HELMI UMAM

NIM: EO.13.97.022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2001**

GADJAH BELANG
Kampus Semarang 50132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

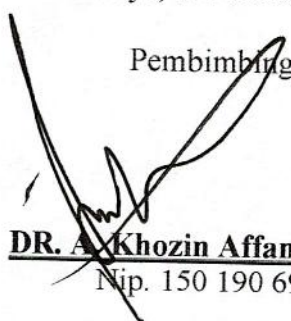
Skripsi oleh **M. Helmi Umam** dengan judul,

**“ FENOMENOLOGI POLITIK; Deskripsi Fenomenologis Atas Konsep
Kekuasaan Dalam Filsafat Politik Aristoteles”**

Telah dikoreksi dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Pebruari 2001

Pembimbing



DR. A. Khozin Affandi, M.A.

Nip. 150 190 692

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Muchammad Helmi Umam** ini telah dipertahankan di depan Tim
Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Pebruari 2001

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

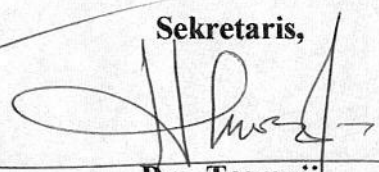
Dekan,


DR. A. Khozin Afandi, M.A.
NIP. 150 190 692

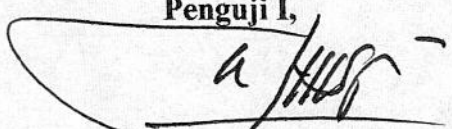
Ketua,


DR. A. Khozin Afandi, M.A.
NIP. 150 190 692

Sekretaris,


Drs. Tasmuji
NIP. 150 255 397

Penguji I,


Drs. H. Kasno, MAg
NIP. 150 224 889

Penguji II,


Drs. Asrofi Sidqon
NIP. 150 178 168



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Penegasan Judul	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Teknik Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES

A. Riwayat Hidup dan Karya Aristoteles	14
1. Riwayat Hidup.....	14
2. Karya-karyanya	19
B. Sistem Filsafat Aristoteles	25
1. Metafisika (Filsafat Pertama dan Ontologi	29
2. Logika (Ilmu Mantik)	34
3. Pengetahuan Alam dan Pengetahuan Kejiwaan	36
4. Etika dan Politik	39
C. Filsafat Politik Aristoteles	41
1. Pengertian dan Sejarahnya	41
2. Konsep Kekuasaan.....	43

BAB III :DESKRIPSI FENOMENOLOGIS

A. Sejarah Munculnya Fenomenologi.....	53
B. Tokoh Fenomenologi dan Garis Besar Pemikirannya	56
1. Edmund Husserl.....	56
2. Martin Heidegger.....	60
3. Maurice Merleau-Ponty	61
C. Fenomenologis Sebagai Metodologi Filsafat	64
D. Deskripsi Fenomenologis	67
1. Filsafat Sebagai Deskripsi Fenomenologis.....	67
2. Deskripsi Fenomenologis	69

2. Pemegang Kekuasaan	76
-----------------------------	----

3. Penyelenggaraan Kekuasaan	79
------------------------------------	----

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Dialog Dengan Bentuk Kekuasaan Lainnya	83
---	----

1. Konsep Kekuasaan Dalam Islam	83
---------------------------------------	----

2. Kekuasaan Dalam Konteks Keindonesiaan	89
--	----

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran	97
----------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	-----

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Zoon Politikon, itulah cermin gambaran manusia dalam bingkai interaktif antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Istilah itu diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Maksud dari istilah itu ialah bahwa secara kodrati seseorang tidak dapat melepaskan diri dari situasi bekerjasama dengan orang lain. Setiap manusia mutlak membutuhkan manusia lain untuk melengkapi kehidupannya agar tercapai secara utuh dan sempurna¹. Keniscayaan semacam itu menegaskan bahwa kenyataan politis adalah kenyataan asasi yang selalu relevan serta tetap aktual dalam setiap peradaban.

Sejarah pemikiran kefilosofatan telah menempatkan Aristoteles sebagai seorang filosof pertama yang secara sistematis meletakkan dasar filsafat politik. Melalui landasan filsafat *praxis*²-nya, ia telah menggambarkan ketertujuan hidup manusia terhadap hasrat atas hidup baik (*euzen*). Adapun hasrat hidup yang baik itu sendiri ditujukan dalam rangka mencapai tujuan utama, yakni kebahagiaan (*eudaimonia*)³.

¹Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 35.

²Istilah *praxis* diambil dari dua pembagian yang diajarkan oleh Aristoteles yang lawannya adalah *teoritis*. *Teoritis* merujuk pada refleksi keteraturan hukum serta karakter dasar yang 'ada', sedangkan *praxis* mendasarkan diri atas penelitian mengenai tindakan manusia. Lihat, Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika*, 28.

³Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika*, 29, 30.

Melalui dukungan penelitian⁴, prinsip-prinsip etika itu dianalisa sedemikian rupa berdasarkan observasi melalui pengamatan terhadap 158 negara kota⁵ yang ada di Yunani. Sehingga dari proyek penelitian tersebut menghasilkan produk pemikiran besar tentang filsafat politik. Hasil pemikiran yang luar biasa⁶ menurut ukuran prestasi pada masa itu.

Dalam buku *Politika*, Aristoteles telah meletakkan beberapa konsep tentang pengandaian-pengandaian yang ada dalam sebuah negara. Konsep yang berisi uraian thema-thema mendasar mengenai persoalan politik. Seperti persoalan negara, kekuasaan dan penyelenggaraannya, kewarganegaraan, hukum, pendidikan, kesamaan hak, pemilikan harta kekayaan, bahkan sampai pada lembaga perkawinan keluarga. Lengkapnya, permasalahan kenegaraan yang diangkat Aristoteles merupakan bukti nyata atas kemapanan filsafat politiknya.

Dalam salah satu bagian dari buku *Politika*, terdapat sebuah teori tentang *kekuasaan*. Aristoteles meletakkan kekuasaan dan penyelenggaraannya sebagai salah satu bagian dari aspek kehidupan bernegara. Di sana diletakkan dasar

⁴Penelitian yang dimaksudkan di sini adalah pengumpulan data dari 158 model institusi penyelenggaraan pemerintahan mengenai beberapa negara kota (*polis*) yang ada di Yunani. Penelitian tersebut dilaksanakan oleh Aristoteles dibantu oleh Theophrastus. Seluruh riset tersebut sepenuhnya mendapat bantuan, baik financial maupun politis dari Alexander. Lihat Ahmad Tafsir (*Filsafat Umum*, 1990), 51., juga Ernest Bakker (*Encyclopaedia of The Social Science*-vol.1, tt), 192., atau John Rowe Workman (*Encyclopaedia Americana*-vol.2, 1993), 288.

⁵Ernest Bakker, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, Vol. 1, Edwin Selligman, et. Al. (New York: Macmillan Company, tt), 192.

⁶Joko Siswanto, *Sistem-Sistem Metafisika Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 12.

kekuasaan melalui beberapa tinjauan, di antaranya tentang; sumber kekuasaan; pemegang kekuasaan; dan model penyelenggaraan kekuasaan⁷.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kekuasaan adalah salah satu komponen bagi landasan tata negara. Kekuasaan merupakan kenyataan riil kemanusiaan. Pengertian kekuasaan menyertai setiap institusi, baik negara, hukum, pendidikan, seni, atau bahkan agama. Berbicara kekuasaan berdasarkan pengertian politik berarti berbicara mengenai hubungan antara manusia (sebagai warganegara) dengan pemerintah (lembaga negara). Hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai. Kekuasaan memperbincangkan tentang bagaimana pemerintah mengatur warga negaranya atau bagaimana warga negara membutuhkan pemerintah dalam proses kenegaraan. Inti membicarakan kekuasaan adalah bagaimana menuju sebuah negara yang baik yang diinginkan bagi semua.⁸

Fenomenologi adalah salah satu aliran dalam sistem filsafat yang hadir beberapa abad setelah Aristoteles. Fenomenologi merupakan metode analisa pengetahuan. Sebuah metode analisa deskriptif dan introspektif tentang aspek terdalam atas semua bentuk kesadaran dan pengalaman manusia paling murni yang terkait langsung dengan obyek benda-benda⁹. Fenomenologi merupakan

⁷JH. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 54, 56, 58..

⁸*Illustrated World Encyclopaedia*, Vol. 2 Am-Az, A.H. Morehead, et.al. (New York: Bobley Publishing, 1965), 364.

⁹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 236.

studi pendekatan melalui penelitian konsep-konsep asal kebenaran dan kebaikan dengan tujuan menemukan landasan pengetahuan terdalam¹⁰.

Deskripsi fenomenologis merupakan salah satu bentuk dari metode-metode yang ada dalam fenomenologi. Deskripsi fenomenologis bertugas menguraikan gambaran atas obyek dengan ketentuan-ketentuan khusus. Deskripsi fenomenologis berasal dari deskripsi psikologi *Franz Brentano*, di mana ia menjadikan deskripsi fenomenologi sebagai fungsi kedua setelah fungsi deskripsi psikologi. Di antara ciri analisa fenomenologi deskriptif adalah apriori dan murni (*a-priori and pure*)¹¹ dengan tujuan menggambarkan obyek sejas-jelasnya tanpa menambahkan penjelasan-penjelasan hipotetik subyektif. Deskripsi fenomenologis juga dapat berperan sebagai metode untuk meletakkan landasan nilai sebuah pengetahuan (*founding of the normative science*). Yakni fungsi menggambarkan konsep menurut kandungan artinya sejas mungkin sekaligus melakukan investigasi atas nilai pengetahuan.

Permasalahan yang ingin diketengahkan adalah adanya kesadaran bahwa teori kekuasaan Aristoteles adalah teori yang mengagumkan, komprehensif, serta sangat penting posisinya sebagai rujukan bagi pengetahuan sosial dan politik. Untuk memahami teori besar itu diperlukan penelitian kefilsafatan dalam bentuk analisa yang memadai serta komprehensif. Di sini penulis menganggap fenomenologi cukup mewakili untuk memberikan analisa deskriptif terhadap teori

¹⁰Th. De Boer, *The Development of Husserl's Thought*, terj. Martinus Nijhoff (London: 1978), 57.

¹¹De Boer, *The Development*, 52.

kekuasaan Aristoteles. Sebuah metode analitis yang selalu memandang kualitas obyektif dengan dua intensi, *fisik* dan *psikis*¹² melalui kesadaran murni. Kesadaran yang membanjiri pemahaman manusia melalui situasi analitis dengan kemampuan subjektif dan batiniah untuk menyadari obyek paling dalam¹³. Dengan demikian, dari deskripsi fenomenologis, tujuan penelaahan konsep kekuasaan Aristoteles melalui gambaran secara murni dan mendalam diharapkan dapat tercapai.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut dapat dipahami, bahwa masalah yang hendak disampaikan adalah “*deskripsi fenomenologis atas konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles*”. Gambaran dari sebuah analisa fenomenologis yang akan terproyeksikan kepada obyek yakni konsep kekuasaan Aristoteles yang terdapat dalam filsafat politiknya.

C. Perumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas arah permasalahan di atas, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles.
2. Deskripsi fenomenologis terhadap konsep kekuasaan Aristoteles.

¹²Merle B. Turner, *Psychology and the Philosophy of Science* (New York: Appleton-Century-Crofts, 1967), 186.

¹³Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 236.

D. Penegasan Judul

Dari beberapa istilah dalam judul di muka dapat dipahami melalui beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Konsep kekuasaan Aristoteles.

Konsep kekuasaan adalah obyek yang akan dideskripsikan. Ia adalah sebuah pemahaman tentang salah satu bangunan yang ikut memperkuat negara. Sedangkan pengertian umumnya adalah sebuah istilah yang mengacu pada penggunaan wewenang kekuatan dalam pola hubungan antara pemerintah (*penguasa*) dan rakyat (*yang dikuasai*) dalam sebuah sistem penyelenggaraan kekuasaan¹⁴.

2. Deskripsi Fenomenologis.

Pendekatan filosofis atau analisa kefilsafatan yang berupa penggambaran terhadap obyek, yakni konsep kekuasaan, secara murni dan jelas.

Penggambaran yang merupakan analisa murni terhadap bentuk-bentuk pengklasifikasian fenomena. Ia adalah sistem deskripsi analitis yang juga berusaha mencari nilai dasar pada setiap pengetahuan¹⁵.

3. Fenomenologi Politik.

Istilah di atas adalah istilah turunan yang dimaksudkan sebagai sintesa hipotetik, dimana istilah ini lahir dari usaha penggambaran secara fenomenologis atas filsafat politik Aristoteles. Dengan kalimat lain, istilah

¹⁴JH. Rapar, *Filsafat Politik*, 60.

¹⁵De Boer, *The Development*, 52.



ini adalah hasil dari refleksi deskriptif fenomenologis terhadap teori

kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, setidaknya dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles secara utuh dan menyeluruh.
2. Memahami konsep kekuasaan tersebut melalui deskripsi fenomenologis.

F. Kegunaan Penelitian

Pemahaman baru yang obyektif demi terbentuknya khazanah pemikiran politik dapat terus berkembang bila ditelaah melalui perbendaharaan pikiran-pikiran beberapa tokoh yang pernah meletakkan landasan filsafat politik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Begitupun juga, pemahaman secara komprehensif terhadap pemikiran yang berkenaan dengan konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles merupakan upaya memahami pemikiran Aristoteles secara memadai, obyektif, dan terpercaya. Sebuah pemahaman, baik yang mencakup materi pemikirannya, tinjauan filosofisnya, maupun konteks kesejarahan yang melingkupinya.

Dari beberapa uraian di atas, setidaknya dapat dicerna bahwa penelitian tentang deskripsi fenomenologi terhadap konsep kekuasaan Aristoteles setidaknya memiliki beberapa kegunaan di antaranya;

Pertama, kebesaran Aristoteles terbukti jelas telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran kefilosafatan sepanjang sejarah. Hal ini memberi arti bahwa kajian serta telaah tentangnya kemudian menjadi beban etis intelektual bagi setiap insan akademis, terutama dalam bidang filsafat. *Kedua*, hasil pemikiran Aristoteles yang besar tersebut tidak akan berkembang menjadi kekayaan intelektual jika tidak digali kedalamannya, diusahakan perbaikannya, dan diutarakan kritiknya. Sehingga apapun yang dapat dilahirkan dari penelaahan tersebut minimal dapat memberikan tawaran pemikiran baru bagi dunia pengetahuan manusia. *Ketiga*, usaha pemahaman atas salah satu konsep Aristoteles yakni tentang kekuasaan ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi beberapa penelitian akademis khususnya yang berkenaan dengan teori kekuasaan Aristoteles ataupun pikiran politiknya.

G. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, secara eksplisit belum terdapat hasil penelitian berkenaan tentang konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles melalui analisa deskripsi fenomenologis. Dalam bacaan pemikiran kefilosafatan, baik *sistemik* maupun *historik*, dari konsep kekuasaan itu belum pernah dilakukan sebuah deskripsi dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Penulis hanya berusaha memakai analisa fenomenologi sebagai metode deskripsi-filosofis terhadap obyek.

Untuk membaca rentetan jalan sejarah tersebut, penulis menggunakan pijakan tentang gambaran sejarah perjalanan pemikiran filsafat dari masa Yunani *pra-Sokratik* sampai pada masa modern dalam *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*

terj. Soejono Soemargono.¹⁶ Didukung oleh sistem *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*¹⁷, yang memuat kelahiran, perkembangan, klasifikasi, serta strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Kesadaran kritis yang seharusnya ada dalam dunia filsafat harus diperkuat dengan landasan teoritis tentang tema filsafat itu sendiri, dan dasar teoritis mengenai etika dan filsafat politik Aristoteles dikaji dari *13 Model Pendekatan Etika*.¹⁸

Motivasi yang melatari tergugahnya usaha analisis ini didasari atas masukan yang diberikan oleh *Encyclopaedia of the Social Sciences*, VI-Eleven.¹⁹ yang berisi tentang basis teoritis mengenai bangunan sosial, termasuk juga didalamnya politik dan tata negara. Selanjutnya dalam *Filsafat Kebudayaan Politik*²⁰, yang dengan panjang lebar mengemukakan berbagai alasan tentang pentingnya nuansa filsafat yang aplikatif sebagai metode kritis untuk menelaah segala kondisi yang ada, terutama dalam masalah politik dan kebangsaan.

Thema utama tentang pemikiran filsafat politik Aristoteles dapat dilihat jelas dalam *Filsafat Politik Aristoteles*.²¹ Kisah filosofis yang berisi abstraksi dan point-point pemikiran politik Aristoteles serta menceritakan latar belakang pemikiran filsafat politik tersebut sekaligus beserta landasan referensi utamanya,

¹⁶Bernard Delfgaauw, *Sejarah Ringkas Filsafat barat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

¹⁷Ed. M. Thoyibi, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*, (Surakarta: MUP, 1994).

¹⁸Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

¹⁹Edwin Selligman, et. Al., *Encyclopaedia of The Social Sciences*, Vol. 1 (New York: Macmillan Company, tt).

²⁰Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992).

²¹JH. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Politika. Sedangkan untuk referensi utama dari thema filsafat Politik Aristoteles menggunakan terjemahan dari naskah asli Aristoteles, yaitu *Politics*²² yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id merupakan terjemahan langsung dari karya Aristoteles, *Politika*. Penjelasan pelengkap mengenai Aristoteles, kehidupan, karya, dan pemikiran filsafatnya diambil dari beberapa ensiklopedi.

Perkenalan ke dalam dunia fenomenologi didapati dari *Kamus Filsafat*²³, yang sekilas memberikan dasar pengertian fenomenologi secara umum sekaligus menurut perspektif beberapa tokoh. Selanjutnya, kajian fenomenologi secara genetis beserta perkembangannya diambil dari *Psikologi Fenomenologis*²⁴ dengan perlengkapan gerakan protes fenomenologi atas empirisme dan intelektualisme. Adapun beberapa petunjuk pembantu untuk membimbing kearah pemahaman deskripsi fenomenologis diperkuat oleh *Psychology and the Philosophy of Science*,²⁵ tentang obyek-obyek fenomenologi dan pemahaman intensionalitas fenomenologi.

Operasi refleksi deskripsi fenomenologis diperkenalkan oleh *Ensiklopedi Psikologi*²⁶, berisi tentang sistem metafisika yang luas, penelusuran kesadaran sebagai penerima fenomena atau penampilan, dari bentuk paling sederhana sampai pada yang paling rumit. Kemudian dalam *Phenomenology, Interpretation*,

²²William Jowet, *Great Books of The Western World*, vol. IX, *Politics* (Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc, 1952).

²³Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

²⁴MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis* (Jakarta: Gramedia, 1984).

²⁵Merle B. Turner, *Psychology and The Philosophy of Science* (New York: Meredith Corporation, 1968).

²⁶Rom Harre dan Roger Lamb, *Ensiklopedi Psikologi*, terj. Danuyasa Asih Wardji (Jakarta: Arcan, 1996).

and Community,²⁷ yang berisi pokok-pokok fenomenologi E. Husserl, metode-metode dasar fenomenologi, dan petunjuk masuk kepada pintu fenomenologi.

Sedangkan paparan operasi deskripsi fenomenologis lanjut di dasarkan atas *The Development of Husserl's Thought*.²⁸

A. Metode Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dengan pendekatan melalui metode;

1. Pengumpulan Data.

Data dikumpulkan dari keterangan naskah, referensi, fakta, atau peristiwa sejarah ditangkap nilai, arti, dan maksudnya melalui eksplorasi kepustakaan (*library research*).

2. Analisis Data.

Seluruh data yang tersaji sebagai bahan penelitian akan dianalisa melalui metode deskriptif. Seluruh uraian pikiran akan diutarakan melalui bahasa dalam perspektif deskripsi fenomenologis, yang selanjutnya metode ini akan dibahas lebih lanjut pada bab tiga.

²⁷ Lenore Langsdorf, et. al., *Phenomenology, Interpretation, and Community* (New York: SUP., 1996).

²⁸ De Boer, *The Development of Husserl's Thought*, terj. Martinus Nijhoff (London, 1978).

I. Teknik Penelitian

Teknik penelitian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Penggalan Data.

Data *primer* yaitu seluruh keterangan utama atau keterangan langsung (*paling dekat*) dengan sumber dalam referensi tentang filsafat politik Aristoteles. Data primer di antaranya meliputi; *Politics* serta *Filsafat Politik Aristoteles*.

Data *sekunder* merupakan keterangan pembantu untuk melengkapi data utama.

Data sekunder meliputi latar belakang timbulnya filsafat politik Aristoteles, pengaruh filsafat politik Aristoteles terhadap pemikiran politik dunia sesudahnya, sistem filsafat Aristoteles, latar belakang fenomenologi sebagai sebuah filsafat analitis, metode deskripsi fenomenologis, serta bentuk-bentuk analisa fenomenologis lainnya. Data sekunder meliputi seluruh data pembantu sebagaimana yang telah diutarakan *dalam tinjauan pustaka* tersebut di atas.

2. Pelaksanaan Penelitian.

Data yang tersaji pertama (*data primer*) diidentifikasi dengan cara analisa materi (*content analysis*) kemudian seluruh hasil analisa akan diutarakan dalam sebuah deskripsi fenomenologis.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam keseluruhan penelitian ini terdapat lima bab yaitu:

1. Bab I: Pendahuluan.

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Bab II: Filsafat Politik Aristoteles.

Bab ini mengemukakan landasan teori yang menjelaskan pemikiran politik Aristoteles. Pembahasan rincinya meliputi: riwayat hidup dan karya, sistem filsafat Aristoteles, filsafat politik Aristoteles; pengertian dan sejarahnya, serta konsep dasar filsafat politik Aristoteles tentang kekuasaan.

3. Bab III: Analisa Fenomenologis.

Bab ini mengemukakan filsafat fenomenologi yang meliputi: latar belakang sejarah timbulnya fenomenologi, tokoh-tokoh fenomenologi dan garis besar pemikirannya, fenomenologi sebagai metodologi filsafat, serta landasan teori tentang deskripsi fenomenologis.

4. Bab IV : Deskripsi Fenomenologis atas Konsep Kekuasaan Aristoteles.

Dalam bab ini dikemukakan konsep kekuasaan Aristoteles dalam lintasan pemikiran politiknya melalui operasi deskripsi fenomenologis

5. Bab V : Bab terakhir ini merupakan generalisasi dari keseluruhan kajian analisis data yang berisi kesimpulan serta saran.

BAB II

FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES

A. Riwayat Hidup dan Karya Aristoteles

1. Riwayat Hidup.

Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 SM di *Stagyra (Stagirus)* kota sub-polis *Chaldice*, wilayah *Thracia*, daerah koloni Yunani dekat pantai semenanjung Macedonia di sebelah utara kelompok kepulauan Athena. Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga bangsawan. Silsilah keluarganya dikenal lama dekat dengan keluarga istana Macedonia. Bapaknya bernama *Nicomachus*, seorang dokter pribadi raja *Amyntas II* yang tergabung dalam serikat kerja pelayan istana *Asclepiadae*. Pelayanan *Nicomachus* berlanjut sampai kepada anak *Amyntas*, Raja *Philippus II*. Profesi sang ayah itulah yang mungkin mendorong pewarisan minat besar kepada Aristoteles untuk lebih tertarik pada ilmu biologi, pengobatan dan fisika. Keluarga Aristoteles juga termasuk keturunan *Ionia* yang konon juga masih dalam satu garis kerabat dengan para filsuf alam *Ionia*.

Di tahun 367 SM. pada usia ke-17, ayahnya telah wafat dan atas anjuran pengasuhnya, *Proxenus* ia pergi ke Athena untuk mengikuti pendidikan pada sekolah Plato. Di sana ia menjadi salah satu bagian dari komunitas intelektual *Akademia*. Sampai kira-kira selama 20 tahun ia belajar di sana. Ia menjadi murid terbesar Plato¹. Ia juga dianggap memposisikan dirinya sebagai oposisi bagi *Isocrates*, seorang pemimpin sekolah *Shopis* yang mengajarkan retorika politik.

¹Von Schmid, *Ahli-ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terj. R. Wiratno (Jakarta, Pembangunan, 1962), 28.

Di Athena waktu itu terdapat dua sekolah besar yang berbeda aliran, Akademi Plato dan sekolah Shopis Isocrates. Sehingga saat itu diakui ada dua profesor dalam bidang retorika di Athena, Isocrates dan Aristoteles. Selama menjadi murid Plato, Aristoteles dikenal sering berbeda pendapat dan bersinggungan paham dengan gurunya. Karena merasa senang dan bangga kepada Aristoteles, Plato memberikan sebutan kepadanya dengan *nous* (*semangat jiwa*).²

Sepeninggal Plato tahun 347 SM. dan kemenakannya yang bernama *Speusippus* memimpin akademi, Aristoteles mengembara bersama seorang karibnya *Xenokrates* ke *Mysia* daerah *Aegean timur*, tepatnya di utara kota *Troad* termasuk bagian kepulauan *Lesbos*. Di sana ia merintis pendirian sekolah di *Atarneus*, daerah Asia Minor, di bawah rekomendasi dan perlindungan raja *Hermias* (bekas sahabatnya saat di akademi Plato)³, penguasa *Atarneus* dan *Assus*. Dan di sanalah ia menemukan jodohnya yang tak lain adalah anak angkat dari raja *Hermias*. Ia menikah dengan *Pythias* pada 344 SM dan ia sangat berbahagia dengan pernikahannya itu. Meskipun demikian hal itu tidak berlangsung lama karena setelah tiga tahun menetap di sana, *Hermias* tertawan oleh kerajaan Persia dan terbunuh di sana, Aristoteles bersama isteri, *Xenokrates* dan *Theophrastus*, koleganya yang juga merupakan muridnya, pindah ke *Assus* kemudian ke *Mitylene*.

Pada tahun 342 SM. Aristoteles dipanggil ke *Pella* oleh Raja *Philippus II* untuk memberikan pelajaran privat anaknya, *Alexander*. Ia memenuhi undangan

²Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), 43.

³Poedjawijatna, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 36.

tersebut, sedangkan sahabatnya, Xenokrates kembali ke Athena. Alexander adalah seorang putra mahkota kerajaan Macedonia yang di kemudian hari terkenal sebagai penakluk dua cakrawala (*zul-karnain*), *Alexander the Great*. Aristoteles memberikan ajaran-ajaran ilmu kebijaksanaan dan etika kepadanya selama tujuh tahun, sampai pada tahun 340 SM. saat Alexander sudah mulai memerintah masih dengan posisi sebagai pejabat raja.

Setelah Alexander memulai ekspedisi pertama untuk mengadakan ekspansi kekuasaannya pada tahun 336 SM., Aristoteles kembali ke Athena. Ternyata di sana ia menjumpai Xenokrates sudah menjadi pemimpin Akademi Plato, setelah sebelumnya mengalahkan pesaingnya, *Heraclides*, *Ponticus* dan *Menedemus* dalam sebuah suksesi pasca wafatnya Speusippus. Selama dua belas tahun, dari tahun 335-323 SM., Aristoteles sibuk menjadi maha-guru filsafat pada perguruan tinggi yang didirikannya *Lyceum* (Universitas yang berdiri dekat gelanggang gymnasium dewa *Lyceus*-dewa pelindung serigala). Memberikan pengajaran pada pagi hari, mengadakan seleksi bagi siswa yang akan naik ke jenjang lanjutan, dan sore hari ia berikan kuliah umum dengan jumlah peserta yang lebih besar⁴. Aristoteles menggunakan model pengajaran *paripatetis*, yakni pengajaran dengan berjalan-jalan di taman sambil mengamati obyek secara langsung. Pada saat ia mulai mengajar di *Lyceum* itulah Athena jatuh menjadi salah satu daerah kekuasaan Macedonia. Dan pada saat yang sama Alexander memberikan subsidi kepada Aristoteles untuk membangun perpustakaan dan

⁴Henry Jackson, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Volume I, James Hasting, et. al. (New York: Charles Scribner's Sons, tt), 786.

museum di Athena. Alexander juga memberikan jaminan serta rekomendasi pada panitia penyelenggara untuk mengusahakan koleksi sampel klasifikasi hewan dan tumbuhan yang berasal dari wilayah Mediterania timur untuk keperluan museum dan aktifitas penelitian.

Lontaran pemikiran dan kurikulum yang diberikan Aristoteles sangat berlainan dengan kurikulum yang dipakai dalam Akademi. Ia telah melakukan modifikasi pengajaran dengan cara klasifikasi berdasarkan materi dan jenis pelajaran secara terpisah. Sehingga perguruan tinggi baru yang ia bangun menjadi sekolah favorit saat itu. Dalam melontarkan ajaran-ajaran serta pemikirannya, ia terkesan berani dan dekonstruktif terutama tentang kepercayaan dan tata keyakinan penduduk. Mungkin saat itu karena Alexander masih selalu melindungi posisinya dan sepenuh hati mendukung pemikiran-pemikirannya. Padahal sebagian masyarakat Athena yang saat itu sudah menjadi bagian wilayah jajahan Macedonia (*Greco-Romawi*)⁵ merasa kurang senang akibat tekanan dari proses invasi yang dilakukan oleh raja Alexander.

Aristoteles lebih memilih mengambil kesimpulan pada hal kongkrit sesuai dengan apa yang dialami manusia daripada mengambil pedoman kepada hal-hal universal yang abstrak. Sehingga ia dicurigai menentang dewa-dewa Yunani. Sebagaimana 80 tahun sebelumnya, dimana Sokrates pernah dihukum mati karena

⁵ Ismail Ragi al-Faruqi, *Historical Atlas of The Religion of The World* (New York: Macmillan Publishing, tt), 36, 37.

dituduh *ateis*⁶. Ia juga dituduh telah menghina dewa-dewa Yunani serta mengkultuskan Hermias, raja Atarneus dan Assus, sebagai dewa.

Tatkala terdengar kabar bahwa Alexander meninggal dunia di *Babylonia* dalam medan peperangan, di kota-kota dalam cakupan wilayah Macedonia terjadi kekacauan termasuk juga Athena. Kekacauan dan kondisi yang tidak menentu itulah penyebab kenapa Aristoteles harus melarikan diri dari Athena karena khawatir akan tekanan kelompok *kontra-Macedonia*. Ia menuju *Chalcis* di *Eubua*, semenanjung barat laut Athena dan pada tahun 322, sang maha-guru tersebut meninggal dunia pada usia yang ke-63.

Riwayat hidup *Aristoteles* biasa dikelompokkan dalam tiga periode. *Pertama*, saat ia menjalani masa-masa sebagai salah satu murid Plato. *Kedua*, adalah masa pengembaraannya dari Asia kecil sebelah timur Aegean sampai pada waktu ia didaulat oleh Raja Philippos II untuk mendidik putra mahkotanya di istana Pella. *Ketiga*, tatkala ia dengan total dan penuh ekspresif menjadi maha-guru pada perguruan tinggi Lyceum di Athena.

Pada satu pendapat lain⁸ dikemukakan, bahwa bentuk pemikiran kefilosafatan dan struktur pengetahuan Aristoteles dipengaruhi oleh tiga faktor utama selama masa hidupnya; *pertama*, pengaruh posisi bapaknya, Nicomachus, yang karenanya Aristoteles menjadi begitu tertarik pada pengetahuan biologi dan prosedur ilmu pengetahuan. *Kedua*, waktu ia berumur 17 tahun saat ia menjadi

⁶Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika*, 27.

⁷Ernest Bakker, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, 191.

⁸John Rowe Workman, *Encyclopaedia Americana*, vol. 2, ed. Americana Corporation (New York: Grolier Incorporated, 1993), 288.

salah satu siswa akademi. Pada masa ini Aristoteles tampak berkonsentrasi pada peletakan dasar etika dan estetika serta kajian perbandingan dengan hasil pemikiran filosof-filosof Yunani awal sebelumnya. *Ketiga*, masa ketertarikan Aristoteles pada bidang pengetahuan ilmu hayat, mengenai hewan dan tumbuh-tumbuhan. Juga ketertarikan Aristoteles pada bidang kajian tentang konstitusi dan bentuk-bentuk pemerintahan di Yunani.

Kedua pendapat di atas, semuanya menunjuk pada sebuah perjalanan pemikiran Aristoteles secara kronologis. Keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil.

2. Karya-karyanya.

Aristoteles adalah cendekiawan kuno yang mengagumkan serta memiliki bakat luar biasa di bidang pengetahuan. Hal itu dapat disimpulkan jelas melalui karya-karya tulisnya secara langsung maupun karya beberapa pengikutnya sebagai cermin materi pemikiran dan hasil rasanya selama hayatnya. Ada sekitar 400 karya yang telah berhasil ia lahirkan walaupun sampai sekarang karya-karya tersebut sangat sedikit sekali yang sampai kepada kita.

Sepanjang yang dapat ditelusuri bahwa sebagian besar karya Aristoteles diolah oleh muridnya yang juga merupakan seorang asistennya dalam melakukan riset, Theophrastus. Hasil olahan data karya-karya Aristoteles yang terkumpul dalam kepustakaan Theophrastus tersebut untuk kemudian dikembangkan pengumpulannya oleh murid Theophrastus, *Neleus*. Antara Theophrastus dan Neleus keduanya memiliki misi untuk menjaga karya-karya Aristoteles dari penyelewengan dan pencurian.

Sanjungan yang diberikan Cicero dalam bukunya “*the golden stream of Aristotle’s discourse*”; atau Quintilian dalam “*grace and fertility*”; serta Dionysius melalui karyanya, *Halicarnassus* yang menyinggung tentang “*force, clearness, and grace*”, sebenarnya pujian-pujian tersebut seyogianya diambil berdasarkan rujukan dari karya tulis Aristoteles ataupun sebagian dialognya, di mana kedua hal itu sampai kepada kita hanya tinggal fragmen-fragmen yang tidak lengkap. Karya-karya yang masih tersisa dan mengiringi kemasyhurannya sama sekali tidak cukup komprehensif dalam segi kualitas literal. Artinya hanya sedikit saja dari sekian banyak karya-karya besar Aristoteles yang secara murni masih bisa kita ketahui di perpustakaan-perpustakaan. Hanya sekitar seperlima dari seluruh karya Aristoteles yang masih tersisa.⁹

Belum lagi, dari sumber-sumber tersebut, kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan bahasa yang bombastis dan berbentuk percakapan. Penempatan proposisi yang seringkali tidak lengkap, terlalu luas, dan bahkan tidak konsisten. Renggang masa yang berabad-abad dari Aristoteles sampai pada kita membawa pengaruh cukup besar atas orisinalitas sebuah karya. Pemaknaan ulang, peletakan ulang, atau revisi seringkali menjadi kendala transformasi pemahaman. Termasuk karya-karya Aristoteles yang hanya didasarkan pada pemahaman murid-murid di sekolahnya.

Hampir seluruh karya Aristoteles yang kita terima sekarang adalah berdasarkan sumber yang dikeluarkan oleh *Andronicus* pada abad pertama SM.

⁹Linda Smith dan William Raep, *Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*, terj. P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 18.

Sebagian karya-karya yang tersisa sebagian besar diambil dari pengumpulan dan proses editing Andronicus. Sebagaimana dalam karya *metaphysica* sebagai contoh, karya masa ketiga dari Aristoteles ini juga diduga kuat merupakan hasil penerbitan Andronicus.

Dan sebagaimana sepengetahuan kita, hasil pemikiran dan buah karya tulis yang muncul dari Aristoteles tersebut masih digunakan hampir selama dua ribu tahun setelah kematiannya. Sepeninggalnya, karya-karya ini masih terus digunakan dalam studi-studi pada sekolah aristotelian sampai tahun 529 M. Setelah adanya kekuasaan kaisar Justinus yang terpengaruh oleh pemikiran Platonik dengan dominasi kristen, sekolah yang kental dengan doktrin aristotelian ini ditutup sampai pada awal abad pertengahan.¹⁰

Pada sekitar abad kedua belas atau setelah tahun 1250-an, para filosof Arab mulai bereksplorasi menterjemahkan karya-karya Yunani terutama karya-karya Aristoteles. Buku-buku yang berisi pikiran Aristoteles menjadi rujukan mengenai pengetahuan umum dan sekaligus memposisikan Aristoteles sebagai cendekiawan besar *par-excellence*. Karena setiap sisi berkenaan dengan aktifitas intelektual selalu ada di bawah pengaruhnya, diantaranya politik, pendidikan, sains, dan filsafat. Filosof Muslim seperti *Ibnu Rushd*, filosof Yahudi *Ibnu Maimun*, dan filosof Kristen *Thomas Aquinas*, hampir ketiganya menempatkan corak filsafat yang mereka bangun sebagai upaya kompromis antara sistem keagamaan mereka dengan ide-ide Aristoteles.

¹⁰ Ernest Bakker, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, 192.

Karya-karya Aristoteles yang berhubungan dengan filsafat moral dan filsafat politik jelas dapat ditemukan dalam lembaran-lembaran pemikiran ahli-
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 ahli psikologi, etika, maupun ahli tata negara kontemporer. Sebagai contoh, *Politika* misalnya, buku ini adalah dasar kajian *Adam Smith* mengenai teorinya tentang pengusahaan negara yang kuat secara ekonomi (*Wealth of Nations*). Teori yang diletakkan oleh Smith ini lebih merupakan unifikasi padu dari analisa sejarah pengetahuan Aristoteles dengan data-data kontemporer. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *Politika*-nya, Aristoteles mempersiapkan karya tersebut melalui deskripsi-deskripsi atas 158 *polis* atau negara kota sebagai obyek penelitiannya.¹¹

Pada dasarnya, dalam proses menghasilkan karyanya-karyanya, Aristoteles pertama kali menulis tentang bahasa dan logika (*the Categories*). Aristoteleslah yang pertama kali meletakkan dasar logika dalam bentuk silogisme. Penulisan yang kedua, ia fokuskan pada karya-karya ilmu alam, fisika. Dan kemudian baru pada masa ketiganya ia menghasilkan karya metafisika, yang berarti 'setelah fisika', dan dari tangannya lah pertama kali istilah metafisika ini lahir.

Berdasarkan pengelompokan yang diuraikan oleh JH. Rapar, karya Aristoteles dibagi dalam lima kelompok berdasarkan jenis dan materi isinya.¹² Pembagian tersebut meliputi;

¹¹ E. Bakker, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, 192.

¹² JH. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 10, 11.

- a) Kelompok pertama biasa disebut sebagai logika atau *organon*.

Kelompok ini terdiri:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) *Categoriae* (kategori).
- 2) *De interpretatione* (tentang penafsiran).
- 3) *Analytica priora* (analitika pertama).
- 4) *Analytica posteriora* (analitika yang terakhir).
- 5) *Topica* (topik).
- 6) *De sophisticis elenchis* (cara berdebat kaum Sophis).

- b) Kelompok kedua memuat diskusi tentang elemen-elemen, gerak, astronomy, dan Tuhan. Bagian ini terdiri atas:

- 1) *Physica* (fisika) terdiri dari delapan buku.
- 2) *Metaphysica* (metafisika) terdiri dari empat belas buku.
- 3) *De caelo* (dunia langit) terdiri dari empat buku.
- 4) *De generatione et corruptione* (pengadaan dan pembinasaan), dua

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 5) *Meteorologica* (meteorologi) terdiri dari empat buku.

- c) Kelompok ketiga terdiri dari karya tulis mengenai *biologi* dan *psikologi*. Mengagendakan sistem klasifikasi makhluk hidup, yakni:

- 1) *De partibus animalium* (tentang anatomi binatang).
- 2) *De motu animalium* (tentang gerak binatang).
- 3) *De incessu animalium* (tentang perjalanan binatang).
- 4) *De generatione animalium* (tentang kejadian binatang).
- 5) *De anima* (tentang jiwa).

6) *Parva naturalia* (tentang monografi biopsikologi).

d) Kelompok keempat merupakan kumpulan hasil penelitian etika:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) *Etica Nicomachea*, terdiri dari sepuluh buku.

2) *Etica Eudemia*, terdiri dari tujuh buku.

3) *Politica*, terdiri dari delapan buku.

e) Kelompok kelima berisi karya sastra:

1) *Rhetorica* (tentang retorika).

2) *Poetica* (tentang puisi).

Pengelompokan Henry Jackson dalam membuat urutan karya-karya utama Aristoteles atau yang disebut dengan nama ‘*acroamatic*’ adalah berdasarkan apa yang dimunculkan dan dijadikan bahan rujukan dalam pembahasan abad pertengahan terdiri dari enam klasifikasi. Pengelompokan tersebut sesuai dengan kronologi penulisannya meliputi;

i. Logika: *Organon*, termasuk *Categoria*, *de Interpretatione*, *Analytica*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Priora, *Analytica Posteriora*, *Topica*, dan *de Sophisticis Elenchis*.

ii. Fisika: *Physica* atau *Physicae Auscultationes*, *de Caelo*, *de*

Generationes et Corruptione, dan *Meteorologica*.

iii. Biologi: *Historiae Animalium*, *de Partibus Animalium*, *de Incessu*

Animalium, *de Generatione Animalium*, *de Anima*, dan *Parva Naturalia*.

iv. Filsafat: Hanya terdiri dari *Metaphysica*.

v. Etika dan Politik: *Ethica Nicomachea*, *Ethica Eudemia*, *Magna*

Moralia, *Politica*, dan *Economica*.

vi. Literatur: *Rhetorica* dan *Poetica*.

Dari model pengelompokan di atas, keduanya masing-masing memberikan gambaran yang sama, yakni tentang buku apa saja yang dapat diidentifikasi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id datang dari Aristoteles. Sehingga pada dasarnya tidak ada sesuatu yang serius untuk diperdebatkan dalam hal mengetengahkan kelompok karya-karya Aristoteles.

B. Sistem Filsafat Aristoteles

Menurut Aristoteles, seorang ilmuwan ataupun seorang filosof harus selalu mendasarkan kajian keilmuannya pada seluruh inovasi tentang pengujian atas fenomena alam serta atas penelaahan tentang perilaku manusia. Dari sketsa umum analisisnya, ia memandang bahwa pengetahuan manusia dapat dikelompokkan melalui tiga macam; *pertama*, filsafat teoritis atau filsafat spekulatif, meliputi theologi, fisika, metafisika, dan bio-psikologi. *Kedua*, filsafat praktis, meliputi etika dan pengetahuan politik. Sedangkan yang *ketiga* adalah filsafat produktif, meliputi retorika, estetika, dan kritik literer.¹³

Untuk menggambarkan corak serta karakter pemikiran filosofis seorang Tokoh besar dan hampir tanpa pendahulu sebagaimana layaknya Aristoteles, salah satu jalannya adalah dengan memosisikannya melalui perbandingan dengan pemikiran gurunya, Plato. Pemikiran Aristoteles dapat didekati dengan terlebih dahulu membedakannya dengan apa yang menjadi identitas pemikiran filosofis Plato. Aristoteles disinggung-singgung memiliki pemikiran dengan kecenderungan *realisme* yang merupakan negasi dari pemikiran Plato yang lebih

¹³ John Rowe Workman, *Encyclopaedia Americana*, 289.

condong ke *idealisme*-nya. Plato memiliki penjelasan tentang segala sesuatu dengan kualitas supra-sensual yang di ambil dari landasan bentuk-bentuk sesuatu tersebut. Sedangkan muridnya, Aristoteles memulai mempelajari fakta-fakta yang diberikan melalui pengalaman.

Penyelidikan Plato tertuju pada rekonsiliasi antara kenyataan fisik dengan fenomena moral dengan menggunakan pendekatan *transendental* atau idealisasi bentuk-bentuk dari sebuah pengamatan tanpa ruang dan waktu. Aristoteles percaya pada kekuatan emosi atau intelektual sebagai piranti interpretatif terhadap sensasai yang terambil dari pengalaman. Interpretasi intelektual atas obyek-obyek partikular menjadi generalisasi universal yang berisi kriteria nilai universal dalam kategori-kategori. Bagi Aristoteles, hakikat yang terkandung setiap bentuk benda dan zat dapat diketahui oleh manusia melalui penyatuan objektif dari bentuk-bentuk benda yang beragam tersebut. Pengetahuan manusia berusaha meng-*abstraksi*-kan *substansi-substansi* dari benda yang banyak ragam tersebut dalam satu *jenis* kelompok yang lebih umum.¹⁴

Sebagaimana diketahui dalam penjelasan di muka, Aristoteles aktif dalam pergulatan intelektual pada akademi Plato selama hampir dua puluh tahun. Masa yang cukup lama tersebut telah membentuk konstruk pemikiran Aristoteles tidak jauh berbeda dengan *mainstream* akademi. Walaupun demikian, intensitas dan keterlibatan Aristoteles secara serius dengan akademi bukan berarti menjadikan bangunan pemikirannya menjadi Platonis. Bagaimanapun juga antara guru dan murid itu tetap memiliki perbedaan yang mendasar, terutama dalam model

¹⁴Von Schmid, *Ahli-Ahli*, 30.

pendekatan dalam setiap penelaahan. Plato melakukan kajian berangkat melalui dunia idenya yang abadi, sedangkan Aristoteles lebih memilih landasan aktual berdasarkan pertimbangan ruang dan waktu. Ia lebih memilih untuk menganggap obyek pengetahuan sebagai kenyataan sebenarnya yang secara langsung dapat disentuh oleh indera melalui jalan abstraksi. Dari keterangan itu dapat dimengerti bahwa pemikiran Aristoteles merupakan bentuk reaksi besar serta koreksi atas prinsip-prinsip dasar pemikiran Plato. Walaupun pada bagian tertentu dalam pemikirannya, yakni tentang visi mengenai skema riset ilmiah (*scientific research schemes*), ia sejalan dengan Plato dengan asumsi bahwa dalam keteraturan hukum alam terdapat jenis-jenis *spesies* yang dapat dikaji melalui persamaan dan perbedaannya.¹⁵

Dari sini diketahui, dalam memandang setiap obyek pengetahuan, Aristoteles memilih kerangka pemikiran dengan dasar orientasi empirik yang kuat. Ia tidak mengadakan perhatian yang serius terhadap dunia cita maupun dunia gejala-gejala. Walaupun secara eksplisit ia juga tidak sepenuhnya menolak sisi-sisi metafisik ataupun ontology.

Contoh dari hal itu dapat dibuktikan dari penolakannya terhadap dua rekan studinya yang keduanya pernah menjadi pimpinan akademi, *Speusippus* seorang ahli biologi dan *Xenokrates* seorang ahli studi moral. *Speusippus* adalah rekan yang banyak memiliki kesamaan visi dengan Aristoteles terutama dalam bidang pendekatan riset dalam biologi, akan tetapi akhirnya ia tentang dengan alasan bahwa dalam setiap pendekatannya, *Speusippus* selalu menganggap bahwa

¹⁵Henry Jackson, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, 787.

keberadaan segala sesuatu yang teramati di alam ini tidak berhubungan dengan pertimbangan metafisik. Demikian pula, ketidaksetujuan Aristoteles kepada Xenokrates adalah karena alasan bahwa Xenokrates telah terjerumus dalam kesimpulan yang terburu-buru tentang metafisika Plato, sehingga keputusannya itu menjadi melenceng jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Plato sendiri. Ia membuat sebuah sintesa yang kurang akurat dengan mencampuradukkan antara pemikiran idealis Plato tentang dunia metafisik dengan penilaian tanpa aturan yang pasti dari Pythagorean. Dan secara apriori menganggap metafisika adalah landasan sebenarnya, sedangkan penelitian aktual adalah pertimbangan yang sama sekali tidak berguna. Menanggapi kedua rekannya ini, Aristoteles memilih untuk lebih menghargai apresiasi Plato dari pada keduanya.

Aristoteles cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan reaksi kritis atas Plato. Dengan bahasa lain, Plato meletakkan landasan ontologi idealistisnya sebagai kerangka *deduktif* atas gejala alamiah, sebagai basis dalam setiap studinya tentang eksistensi kosmik. Aristoteles menolak landasan ontologi idealistis, ia memulai kajian melalui gejala alamiah sebagai pijakan *induktif* atas kesimpulan ontologis.

Sama dengan refleksi kefilsafatan lainnya, Aristoteles memulai renungan kefilsafatan dengan perasaan ajaib dan penasaran terhadap segala sesuatu. Perasaan-perasaan inilah yang nantinya merangsang sensor-sensor dalam pengalaman persepsi (*perceptual experience*). Perasaan ini pula yang membimbing kesadaran untuk selalu menuju sebuah pertanyaan asasi, mengapa?

Sedangkan pertanyaan ini adalah cikal bakal penelitian terhadap sebab-sebab adanya segala sesuatu.

Dari berbagai keterangan yang dapat dihimpun, sistem pemikiran filsafat Aristoteles dikelompokkan berdasarkan buah pikiran yang ia hasilkan dari karyanya, bagian-bagian tersebut akan dipaparkan secara sekilas dan garis besar di bawah ini yaitu tentang;

1. Filsafat Pertama (metafisika dan ontologi).

Metafisika dalam pandangan Aristoteles adalah pelajaran tentang yang ada sejauh ia ada. Berbeda dengan ilmu yang menelaah bagian-bagian khusus dari yang ada. Pengertian metafisika Aristoteles mengarah kepada disiplin yang memuat konsep-konsep yang masih terlalu umum dan tidak bisa diulas oleh pengetahuan khusus semacam fisika. Oleh karenanya metafisika memiliki arti bahasa setelah fisika, yang itu berarti studi tentang sesuatu di luar jangkauan fisika.

Para filosof pra-sokratik, mendasarkan obyek filsafat mereka terhadap *physis* atau dunia pengamatan secara material. Dalam hal ini, baik Aristoteles maupun Plato memandang bahwa filsafat yang seperti itu belum mencapai dasar terdalam dan hanya terbatas pada keterangan fisik yang tidak memuaskan.¹⁶

Karena menilai berdasarkan ukuran kedudukan dan pentingnya, maka Aristoteles mengatakan filsafat seperti itu sebagai filsafat '*kedua*'. Yang selanjutnya dilawankan dengan *filsafat pertama* (*proote philosophia*), menunjuk kepada

¹⁶ Anton Bakker, *Ontologi Metafisika Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 14.

pengandaian filosofis paling mendalam dan paling akhir dalam pengetahuan manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun filsafat pertama tersebut harus memuat *ta hyper-physika* atau kenyataan yang menguasai dunia fisik yang empirik dan *ta physika* atau kenyataan yang membelakangi dunia fisik. Usulan Aristoteles untuk mengajukan cabang baru itu akhirnya melahirkan *ta meta ta physika* atau yang sesudah fisika. Dari situlah kemudian metafisika dikukuhkan Aristoteles sebagai sebuah tuntutan pengajaran filosofis yang seharusnya diajarkan sesudah fisika mengenai masalah-masalah yang lebih fundamental.¹⁷ Sedangkan ontologi dibedakan dengan metafisika hanya pada titik tekanannya. Jika metafisika lebih berhubungan dengan intensitas *nivo pemikiran* obyek formal maka ontologi adalah konsentrasi ekstensitas obyek material.

Permasalahan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai metafisika di antara contohnya adalah persoalan tentang *kausalitas*, *substansi*, *potensialitas*, dan *aktualitas*. Untuk mengawali pemikiran metafisika Aristoteles akan lebih mudah dengan memperhatikan empat prinsip pendekatan (*four principal lines of inquiry*), yang lebih lanjut menjadi empat sebab utama (*four causes*). Apa yang dimaksudkan dengan empat prinsip pendekatan tersebut adalah sebuah kesimpulan atas berbagai pertanyaan dasar hakikat segala sesuatu.

Dari keempat sebab itu adalah ; *pertama*, sebab materi (*the material cause*), berbicara tentang bahan inti dari sesuatu, atau, “darimana sesuatu tercipta” (*out of which*), sesemisal bahan patung, batu. *Kedua*, sebab esensial atau sebab formal

¹⁷ Anton Bakker, *Ontologi Metafisika Umum*, 15.

(*the essential cause/formal cause*), menyatakan tentang bentuk dari sesuatu, mengenai pertanyaan, “apa itu” (*what it is*), bentuk patung. *Ketiga*, sebab gerak atau sebab efisien (*the moving cause/efficient cause*), berkenaan tentang gerak kejadian sesuatu, mengenai, “dengan mana sesuatu diciptakan” (*by which it is created*), yakni proses pembuatan patung oleh pematung. Dan yang *keempat* adalah sebab terakhir (*the final cause*), yakni ketertujuan akhir, untuk apa ketiga sebab tersebut ada (*for which it is*), dalam hal ini adalah kebaikan akan seluruh proses pembuatan patung atau atas kehendak Tuhan.

Jadi dalam metafisika, Aristoteles mengemukakan pertanyaan tentang maksud dan hakikat dari sesuatu yang ada (*the primarily existent*). Ia mengakui bahwa sebuah jawaban sederhana terhadap pertanyaan mendasar tersebut tidak adekuat atau memadai. Sebagaimana yang telah diusahakan oleh filsafat sebelumnya (*pra-Sokratik dan Plato*), dengan pokok pikiran bahwa materi merupakan asas atas segala sesuatu. Bagi Aristoteles, materi bukanlah semata-mata hakikat sesuatu. Materi adalah substratum potensial, bukan wujud aktual segala sesuatu, sehingga dengan demikian materi bukanlah penampakan universal.¹⁸

Dalam persoalan substansi, Aristoteles berpendapat bahwa semua substansi memiliki dua bagian, material dan struktur atau materi dan forma. Materi dan forma ada dalam dunia ini, dan bukan dalam dunia yang mengatasi dunia ini,

¹⁸ Henry Jackson, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, 788.

dunia ide sebagaimana Plato. Forma adalah prinsip organisasi yang mengubah materi menjadi benda-benda yang dapat dikenal.¹⁹

Hylemorphism adalah salah satu sebutan populer tentang pengajuan gambaran benda-benda oleh Aristoteles. Bahwa setiap benda jasmani memiliki dua sudut pandang yakni, *bentuk* dan *materi*. Bentuk dan materi tersebut merupakan prinsip metafisis dari kenyataan. Materi dan bentuk tersebut sama sekali tidak dapat ditunjuk hanya dengan melalui penjelasan sederhana, semisal pengertian sederhana kita tentang *ukiran* dan *kayu*. Materi dan bentuk lebih merupakan pengandaian filosofis agar mampu diupayakan kemudahan dalam mengamati obyek.

Penilaian dari pengamatan terhadap benda-benda jasmani mutlak meliputi dua dasar kenyataan itu. Materi adalah prinsip yang sama sekali *terbuka* dan tidak ditentukan (*infinite*). Ia sebenarnya hanyalah kemungkinan belaka yang menerima prinsip-prinsip bentuk dengan tanpa batasan. Aristoteles biasa menyebut materi ini sebagai materi pertama (*hyle prote*). Materi berperan sebagai dasar pijakan kenyataan paling dalam yang abstrak dan universal.

Kemudian, disadari bahwa hakikat pengetahuan dan ilmu adalah upaya penelitian terhadap setiap bentuk yang turut melekat pada penampakan benda-benda kongkrit,²⁰ maka setiap materi yang umum dan universal tersebut memerlukan bantuan dalam rangka menampakkan diri. Bantuan akan pengandaian inilah yang disebut sebagai *bentuk*. Maka dapat dipahami bahwa bentuk (*morphe*)

¹⁹Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide*, 19.

²⁰K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, 15.

adalah bentuk yang menentukan sekaligus mengupayakan batasan materi-materi.

Dan dari ketentuan bentuk tersebut dimungkinkan adanya sebutan klasifikatif (*kategorial*) pada setiap benda berkaitan dengan prinsip identitas atau penamaan.

Aristoteles menerangkan bahwa gerak dan perubahan adalah sebagai persatuan bentuk dan materi. Bentuk adalah yang menyebabkan gerak dalam materi, bentuk adalah penggerak dan materi adalah yang digerakkan. Gerak adalah perwujudan dari apa yang mungkin (kemungkinan). Di sini, ia menyatakan bahwa Tuhan adalah menjadi sebab pertama dan sebab terakhir. Tuhan merupakan bentuk yang murni dan utama²¹ serta bertanggung jawab atas segala gerak. Semua benda bergerak menuju Tuhan, sebagai tujuan terakhir. Jadi gerak bukan semata-mata tidak sebagaimana mesin, akan tetapi bertujuan (teleologis). Obyek-obyek terdiri dari materi, dan setiap materi selalu mungkin berubah. Sedangkan tiap perubahan adalah tidak sempurna meskipun selalu memiliki maksud dan tujuan. Hanya Allah yang sempurna dan merupakan forma tanpa materi.

Menurut Aristoteles, yang terlupa dalam kajian filsafat Yunani terdahulu adalah bahwa dari keempat teori sebab tersebut, hanya ketiga sebab pertama saja yang mampu disadari. Sedangkan sebab keempat yakni sebab final sama sekali tidak disadari. Padahal menurutnya, justru kekuatan penjelasan atau adekuasi dari pertanyaan pokok di atas adalah adanya kandungan ketertujuan formal. Sebuah ketertujuan gerak dari sesuatu yang potensial (*imperfection*) kepada sesuatu yang aktual (*perfection*) menurut aturan dinamis teleologis (*sebab terakhir*). Esensi dari

²¹ AE. Taylor dan WD. Ross, *Ensiklopedi Umum*, ed. Pringgodigdo (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 80.

segala sesuatu adalah bentuk di mana ia berproses. Potensialitas meletakkan basis konseptual untuk perubahan dan keberlangsungan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari beberapa paparan tentang perihal metafisika di atas, sebenarnya ingin dikatakan bahwa metafisika memuat penyelidikan yang mengatasi dunia indera untuk mencapai penjelasan mengapa dunia ada seperti yang nampak, sambil mencari *yang satu* di balik *yang banyak*.²²

2. Logika, (ilmu mantik).

Aristoteles memiliki keyakinan pasti bahwa logika mutlak diperlukan sebagai pendahuluan sebagai pintu masuk kekuasaan dunia filsafat ataupun pengetahuan. Aristoteles sendiri mengatakan bahwa logika *equivalen* dengan sebuah alasan-alasan yang diajukan secara retorik (*verbal reasoning*). Bentuk dasar atau prinsip pertama yang umum dan sudah tentu yang di dalamnya bergerak segala pikiran untuk berpijak.²³ Pemikiran Aristoteles tentang logika dikukuhkan pada saat masa berakhirnya sekolah paripatetik dalam sebuah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
rangkuman buku yang disebut, *organon* (instrument).

Jika Plato memulai filsafatnya dengan matematika dan intelek, yakni dengan menggalati konsep-konsep yang dapat diolah tanpa berhubungan dengan dunia nyata. Akan tetapi Aristoteles memulai filsafat dengan persepsi dan dunia natural. Pengertian Aristoteles bersifat ilmiah, karena didasarkan pada persepsi, observasi, dan penyelidikan.

²²Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide*, 18.

²³AE Taylor dan WD. Ross, *Ensiklopedi Umum*, 80.



Logika terdiri dari kategori-kategori (golongan-golongan jenis) berupa klasifikasi kata-kata tunggal (*sebagai negasi proposisi*) yang kesemuanya berjumlah sepuluh buah, meliputi; substansi, kuantitas, kualitas, hubungan, tempat, waktu, situasi, kondisi, aksi, dan passion. Kesepuluh kategori ini memiliki fungsi untuk merangkum jawaban seluruh bentuk pertanyaan yang diajukan oleh manusia dalam rangka mengetahui obyek.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semisal; apa sesuatu itu, berapa besar (kuantitas dan kualitasnya), atau bagaimana bentuknya. Dari kesepuluh kategori tersebut, substansi selalu dianggap memiliki posisi paling penting. Substansi dibagi menjadi dua pengertian, *substansi pertama* dan *substansi kedua*. Substansi pertama adalah obyek-obyek individual (*individual objects*); sedangkan substansi kedua adalah *species*, di mana substansi pertama ada di dalamnya.

Kesepuluh kategori tersebut dalam dirinya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan benar atau salah. Kecuali jika dikombinasikan dengan beberapa ide dalam bentuk proposisi, sehingga karenanya pengujian benar-salah menjadi mungkin. Proposisi terdiri dari bagian, yakni kata benda dan kata kerja. Kombinasi dari kata-kata tersebut akhirnya memungkinkan untuk melahirkan kalimat yang masuk akal ataupun sebuah pemikiran, yang memberi penjelasan tentang yang mana yang bagian dan yang mana yang keseluruhan. Logika hanya bertugas secara demonstratif untuk menunjukkan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sedangkan kebenaran dan kesalahan sebuah proposisi tergantung pada kesesuaian atau ketidaksesuaiannya pada fakta dimana sesuatu yang dikandung oleh proposisi tersebut menampakkan diri. Proposisi yang

bertujuan untuk menyebut gambaran secara benar tentang sesuatu disebut dengan definisi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebuah definisi bagi Aristoteles adalah pernyataan yang berupa karakter esensial dari sebuah subyek. Definisi tidak dapat dicapai karena beberapa hal, di antaranya:

- a) Gelap gambarannya (*obscure*), yakni tidak jelas karena disebabkan penggunaan maksud yang equivokal (sama arti) atau frase-frase metaforik;
- b) Terlalu luas (*too wide*), kurang spesifik untuk menuju sebuah fokus yang didefinisikan; dan
- c) Tanpa ketegasan akan pokok permasalahan atau tanpa dasar pensifatan yang jelas.

Jantung dari logika Aristoteles adalah silogisme. Sebagaimana contoh, semua manusia adalah akan mati. Socrates adalah manusia. Maka, Socrates akan mati. Silogisme tersebut terbukti telah mempengaruhi model berargumentasi lebih dari dua ribu tahun sesudahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Pengetahuan Alam dan Pengetahuan Kejiwaan.

Pandangan Aristoteles lebih cenderung bersifat common sense daripada pandangan idealis. Bagi Aristoteles, pengetahuan adalah persepsi sehingga kita tidak akan dapat belajar atau mengetahui tentang sesuatu jika tidak melalui persepsi. Baginya, dunia natural adalah dunia nyata. Persepsi dan pengalaman inderawi adalah dasar pengetahuan ilmiah. Bahwa kenyataan dunia berada dalam materi atau bahan yang membentuk dunia.²⁴

²⁴Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide*, 19.

Aristoteles memandang bahwa jagad raya tersusun atas dua kutub ekstrim, di satu sisi *bentuk tanpa materi* pada sebuah akhir dan *materi tanpa bentuk* pada sebuah akhir di sisi lainnya. Pandangan tersebut menggiring pada sebuah kesimpulan bahwa obyek penelitian dalam fisika atau filsafat alam Aristoteles adalah perjalanan materi bergerak menjadi bentuk dalam beberapa jenjang dunia alamiah. Dan sebagaimana penjelasan tentang metafisika terdahulu, bahwa proses menjadi dalam alam tersebut selalu punya akhir dan tujuan. Karena seluruh sesuatu di alam ini punya fungsi dan tujuan akhir, sesuatu yang tanpa tujuan adalah bukan sesuatu.

Doktrin fisika yang dikemukakan oleh Aristoteles menentang penolakan terhadap pengertian akan gerak, ruang dan waktu, dan waktu. Karena di manapun terdapat sebuah desain atau rencana rasional secara evidensial. Sedangkan proses gerakan materi menjadi bentuk tersebut dapat didekati dalam empat wujud:

- a) Gerak yang membawa pengaruh akan substansi;
- b) Gerak yang membawa perubahan secara kualitas;
- c) Gerak yang membawa perubahan secara kuantitas; dan
- d) Gerak yang membawa perubahan tempat (*locomotion*), perubahan ini adalah gerak yang paling penting dan fundamental.

Aristoteles menentang anggapan bahwa ruang adalah kosong, karena hal itu adalah tidak mungkin. Pandangan itu sekaligus menolak pengajuan yang diberikan oleh Plato dan kaum Phytagorean tentang ruang yang tersusun atas elemen-elemen geometrik. Bahwa ruang didefinisikan sebagai batas perputaran dimana badan berputar di dalamnya. Sedangkan waktu adalah ukuran gerak

berkenaan dengan sebelum atau sesudah. Waktu bergantung pada eksistensi gerak, sehingga jika tidak ada perubahan di alam ini tentu tidak akan ada waktu. Dari sanalah ukuran gerak terkait dengan pengukuran yang diajukan oleh akal. Jika akal tidak mampu menjangkau ukuran waktu maka tentu tidak ada waktu. Aristoteles berargumen bahwa ruang dan waktu adalah sesuatu tak berhingga yang dapat dibagi (*divisible ad infinitum*) secara potensial, akan tetapi secara aktual ia tidak dapat dibagi.

Dalam pengetahuan tentang jiwa, Aristoteles menjelaskan bahwa jiwa adalah ekspresi lengkap alam atau realisasi badan alam. Jiwa atau akal bukan merupakan produk badan secara fisik, akan tetapi merupakan kebenaran badan (*truth of the body*), substansi yang hanya jika kondisi badan mencapai arti sesungguhnya. Dari definisi ini selanjutnya diketahui bahwa antara psikis dan fisik terdapat sebuah proses hubungan tertutup (*close connection*). Yakni antara badan dan jiwa berproses pada jalan yang sama, di mana impresi melekat secara bersamaan antara keduanya. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan metafisikawan sebelumnya yang memandang jiwa secara abstrak yang sama sekali terpisah dengan wilayah badani. Aristoteles menganggap pandangan itu sebagai sesuatu yang salah.

Jiwa adalah aktifitas yang terdiri dari bagian atau fakultas yang diwujudkan atas hasil perpaduan dengan jenjang perkembangan bangunan biologis. Bangunan yang berkaitan dengan bagian pemenuhan makanan (*nutrition*) pada dunia tumbuhan, bagian gerak instinktif pada sisi kehewan, dan bagian pengusahaan akal pikiran pada sisi kemanusiaan.

4. Etika dan Politik.

Etika ditujukan dalam rangka mengusahakan keadaan paling baik atau kebaikan paling tinggi dalam kehidupan manusia. Kebaikan yang merupakan tujuan paling akhir sesungguhnya dalam hidup. Kebaikan tertinggi tersebut biasa diterjemahkan dalam kehidupan sebagai kebahagiaan. Walaupun dalam hal ini Aristoteles masih mengakui adanya subyektifitas setiap manusia dengan keunikan pengalamannya untuk memahami kebahagiaan menurut pandangan masing-masing orang. Akan tetapi ia juga menolak Plato yang masih menganggap kebaikan dapat ditemukan dalam pandangan ideal atau abstrak bahwa setiap pribadi secara eksistensial mengandung kebaikan.

Kebaikan harus ditemukan dalam fakta atau pengalaman individu, ia harus dilandaskan atas sesuatu yang ada dalam praktik dunia manusia. Kebaikan harus ditemukan dalam setiap keunikan tata kerja dan hidup manusia-manusia. Keluasan akan kebaikan yang unik pada setiap pribadi tersebut bukan berarti kebaikan yang dimungkinkan timbul dari sisi tumbuhan manusia yang vegetatif atau sisi kebinatangannya yang sensitif. Kebaikan, bagi Aristoteles masih harus tetap dirujuk dari kesempurnaan realisasi manusia dengan menggunakan akal pikirannya yang memancar dari jiwa dan pribadi sepanjang hidupnya.

Aristoteles menggariskan dengan struktur dan animasi mengenai pandangan tentang kebahagiaan dalam jiwa pada sebuah kehidupan organisme manusia. Bagian-bagian jiwa manusia dibagi sebagai berikut;

	Calculative – Kebajikan Intelektual.
<i>Rational</i>	Appetitive – Kebajikan Moral.
<i>Irrational</i>	Vegetative – Kebajikan Nutrisi.

Jiwa manusia memiliki elemen irrasional, yakni pada sisi tumbuhan dan binatang. Pada sisi tumbuh-tumbuhan, jiwa manusia disebut sebagai elemen irrasional paling primitif karena ia hanya bertujuan untuk dapat hidup dan berkembang secara fisik atau biologis. Dan sesuatu yang hanya dapat melakukan perilaku ini disebut sebagai kebajikan nutrisi atau biologis.

Selanjutnya, pengetahuan politik bagi Aristoteles harus selalu mengandaikan terhadap tercapainya bentuk negara ideal yang direalisasikan dan dilengkapi dengan landasan pengetahuan alam yang memadai. Karena idealitas sebuah bentuk negara dan pengetahuan teoritis yang menunjang terhadap terciptanya negara tersebut harus diusahakan bersama-sama. Aristoteles berusaha mendamaikan antara wilayah politik yang praktis dan ada secara faktual dengan landasan teoritis ilmu alam dalam satu koridor yang sama.

Deskripsi dan penelitiannya tentang institusi-institusi dari ke-seratus lima puluh delapan negara kota di Yunani, yang di antaranya Athena, Sparta, Creta, dan Phoenica adalah sebuah penelitian yang teliti dan menawan. Selain sebagai presentasi, penelitian Aristoteles juga merupakan kritik terhadap institusi mengarah pada tujuan terbentuknya cermin negara ideal yang ia maksudkan. Dan pada waktu yang sama, usaha Aristoteles untuk melengkapi analisa politiknya tentang berbagai konstitusi tersebut didukung oleh beberapa teori sosiologinya

berkenaan tentang perubahan sosial dalam fenomena politik. Misalnya, ia menghubungkan antara penemuan dasar institusi negara Athena dengan pembagian antara bangsawan dan bukan bangsawan, miskin dan kaya.²⁵

Dalam buku politiknya, Aristoteles membagi tiga bentuk negara yang dianggap sebagai bentuk paling sempurna. Ketiga bentuk negara tersebut adalah *monarki*, *oligarki*, dan *politeia*.²⁶

C. Filsafat Politik Aristoteles

1. Pengertian dan Sejarahnya.

Sistem filsafat yang dihasilkan oleh Aristoteles dipandang sebagai satu sistem filsafat paling lengkap. Kelengkapan tersebut tidak hanya tampak melalui klasifikasi bentuk-bentuk subyek keilmuan saja, akan tetapi juga meliputi pembahasan materi subyek yang komprehensif. Russel mengatakan bahwa dalam beberapa hal, pada pemikiran Aristoteles sulit sekali untuk di adakan usaha revisi, dengan alasan kelengkapan telaah dan sudut pandanganya yang hampir sempurna. Ia adalah filosof terbesar yang meletakkan dasar-dasar pemikiran besarnya dengan hampir tanpa pendahulu.²⁷

Walaupun demikian, pemikiran politik Aristoteles sulit sekali dilepaskan dengan bayang-bayang pemikiran politik Plato. Pada saat Plato diminta oleh raja kerajaan *Dion* di *Syracus* untuk memberi pendidikan kepada *Dionysius* muda

²⁵Roger N. Baldwin, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, R.A. Selligman, et.al. (New York: Macmillan Company, 1963), 208.

²⁶Muhammad Azhar, *Filsafat Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 27.

²⁷Henry Jackson, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, 786.

sambil ia mengadakan kajian mengenai pemerintahan dan kewarganegaraan kerajaan Syracus, Aristoteles baru datang dari Stageira untuk bergabung dalam Academy. Dan beberapa bagian pemikiran Aristoteles ternyata tetap tidak dapat lepas dari hubungan pemikiran Plato. Kondisi ini menyebabkan kewajaran bila pemikiran politik Plato, *Republik*, lebih populer daripada *Politik* Aristoteles.²⁸

Filsafat politik menempati pada kelompok filsafat praksis bersama dengan etika, sesuai dengan pembagian jenis filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam pendahuluan filsafat praksisnya, pertama-tama Aristoteles mempertanyakan tentang dasar apa sesungguhnya yang dengan kebaikan dalam tujuan hidup manusia (*what is man's chiefest good*). Dalam buku etikanya, Etika Nicomachea, ia meletakkan antara etika dan sikap politik sebagai sebuah kerangka pembahasan yang tidak banyak berbeda. Keduanya merupakan pembahasan tentang kebutuhan manusia sebagai hewan sosial (*a social animal*) yang selalu tidak dapat hidup dengan sempurna kecuali dengan jalan bermasyarakat atau berhubungan dengan manusia lain. Untuk merealisasikan dirinya manusia mutlak harus hidup secara sosial. Fungsi etika dan sikap politik adalah untuk memberikan bimbingan kepada manusia untuk melaksanakan tugas sosialnya secara baik. Perbedaan di antara keduanya hanyalah, jika etika lebih pada kajian tentang aturan-aturan sikap menurut pertimbangan karakter individual, sedangkan sikap politik lebih conong kepada perilaku bermasyarakat atau bernegara dalam sebuah konstitusi.

²⁸ Christopher Breiseth, *A History of Political Theory* (New York: G.H.S., 1961), 88.

Sebagaimana penjelasan pada bagian terdahulu, bahwa pemikiran politik Aristoteles ditemukan dalam beberapa hasil tangannya tentang moral (etika) dan filsafat politiknya politik. Buah karya itu ia hasilkan sebelum serta pada saat ia menjadi pengasuh privat Alexander. Untuk membuat sebuah karya politik, misalnya, ia harus mempersiapkan deskripsi 158 konstitusi atau bentuk pemerintahan yang ada di Yunani. Dan dari keseratus limapuluh delapan data tersebut hanya satu yang masih tersisa, yakni mengenai konstitusi Athena. Dia juga membuat kompilasi kajian tentang perilaku orang Barbar (*the customs of Barbarians*) serta kumpulan kasus dari konstitusi hukum (*cases of constitutional law*).²⁹

Pada saat ia menjadi pengasuh Alexander, terdapat dua karya yang ia hasilkan saat itu, yakni kajian tentang monarki (*on monarchy*) serta karya dengan judul *Alexander* atau koloni-koloni (*on colonies*), yang ia hasilkan saat Alexander mendapatkan kemenangan pertama dalam ekspansi timurnya. Kedua karya inipun hilang dan tidak sampai ke tangan kita. Oleh karena itu, dalam pandangan Aristoteles, kita hanya mampu mendeskripsikan pemikiran politiknya dari tiga buah hasil karya, yakni buku tentang etika, politik, dan konstitusi Athena.

2. Konsep Kekuasaan.

a) Pengertian Kekuasaan.

Aristoteles, dalam *politic*-nya, secara eksplisit belum pernah membahas kekuasaan sebagai obyek kajian tersendiri. Ia hanya menggunakan istilah kekuasaan dalam kaitannya dengan keberadaan

²⁹Ernest Bakker, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, 192.

sebuah negara. Maka tidak mengherankan jika penelitian tentang konsep kekuasaan Aristoteles harus dikaji melalui seluruh pemikiran politiknya karena konsep tersebut tersebar pada tempat yang tidak terorganisasikan dalam pikiran politiknya.

Pada sekitar abad ke 18 sampai abad ke 19 dalam pandangan umum filsafat Inggris, pengertian *kekuasaan aksi* sama dengan kapasitas-kapasitas dorongan hati dan keinginan yang mampu mengatur dan membimbing perbuatan kemanusiaan. Istilah tersebut dilawankan dengan *kekuasaan intelektual* yang termasuk di dalamnya kapasitas-kapasitas rasionalitas, keputusan, dan pemikiran. Berarti ada dua bentuk pengertian kekuasaan, kekuasaan aksi dan kekuasaan intelektual. Perbedaan arti kedua istilah tersebut diturunkan dari analisa Aristoteles tentang kapasitas-kapasitas atau keberadaan kekuasaan hidup yang terbagi menjadi kebutuhan biologis, hasrat, persepsi, gerak, dan akal. Dari sana, rasionalitas direkomendasikan sebagai benang pembatas keistimewaan manusia.

Meskipun pada diri manusia terdapat dimensi *appetitive* (hasrat jiwa atau nafsu), yang termasuk di dalamnya keinginan, dorongan akan rasa nikmat, dan hasrat. Akan tetapi kesemua sisi hasrat tersebut akan mengambil bagian dalam akal melalui kemampuan perasaan. Aristoteles sendiri pertama kali membicarakan kekuasaan dalam Politiknya dengan catatan bahwa manusia dibedakan dengan makhluk hidup lainnya karena ia memiliki keistimewaan berbicara secara teratur. Keistimewaan tersebut ia

sebut sebagai kekuasaan berorasi atau berpidato (*the power of speech*).³⁰

Dan dalam pokok pikiran itu Aristoteles membedakan antara manusia dengan sekelompok lebah yang walaupun mereka berorganisasi akan tetapi tidak memiliki kekuasaan istimewa tersebut. Bagi Aristoteles, perbedaan antara kebajikan moral dan kebajikan intelektual terletak pada perbedaan antara fungsi hasrat dan fungsi akal murni (*appetitive and purely rational functions*) terhadap kemanusiaan. Jadi di dalam manusia terdapat lima bentuk kekuasaan. Kekuasaan kebutuhan biologis, hasrat, persepsi, gerak, dan akal.

Selanjutnya, masih dalam buku *ke-1 Politic* yang berisi tentang asal mula negara, keluarga, dan desa, Aristoteles memahami mengenai sesuatu keseluruhan dan sesuatu yang bagian (*whole and part*), ia mengatakan, secara alamiah negara tersusun dari individu dan keluarga sebagai komponen dasar yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Akan tetapi karena tuntutan ideal, sebuah negara harus memperhatikan ia sebagai sebuah keseluruhan. Padahal kondisi negara tetap tergantung pada bagian-bagian tersebut, bagaimana mereka bekerja dan berkuasa.

Dalam kasus perhambaan (*slavery*) atau perbudakan yang berlaku di negara-negara Yunani saat itu, Aristoteles memandang secara alamiah manusia memiliki kekuasaan untuk memaksa (*power of doing violence*)³¹

³⁰William Jowet, *Great Books of The Western World*, vol. IX, *Politics*, Buku-I (Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc, 1952), 2.

³¹William Jowet, *Great Books, Politic*, Buku-I, 4.

dengan kekuatannya untuk cenderung berperilaku kejam. Sehingga ia membutuhkan orang lain sebagai sasaran kekejaman tersebut. Perbudakan merupakan konsekuensi yang kalah dan yang menang dalam sebuah perang, jika ia menang ia akan berkuasa, dan jika kalah ia adalah budak. Karena sudah menjadi peristiwa alamiah, mereka yang memiliki keunggulan dalam beberapa bidang akan menguasai yang lainnya.

Akan tetapi, situasi aktual yang digambarkan oleh Aristoteles mengenai kekuasaan dalam kasus perbudakan tersebut diikuti oleh penilaian tentang sebuah kekuasaan yang mengandaikan kebijaksanaan (*power seems to imply virtue*). Kekuasaan ini berkaitan erat dengan pandangan ideal Aristoteles dalam pengaturan sebuah negara di mana harus ada pengusahaan kekuasaan dari sang bijak untuk keperluan negara sebagai keseluruhan. Kekuasaan ini berbentuk lembaga peradilan dengan arti melalui kekuasaan hukum.

Jika Plato mengatakan bahwa kekuasaan adalah pengetahuan, maka bagi Aristoteles, konsepsi tersebut masih terlalu abstrak dan tidak cukup praktis untuk dipahami. Walaupun ia secara prinsipil juga tidak menolak akan hal itu. Menurut Aristoteles, kekuasaan tidak lahir dari dogma, dewa-dewa, ataupun agama. Kekuasaan juga tidak dimunculkan dari harta kekayaan, pangkat, dan jabatan. Kekuasaan mutlak lahir dari pengetahuan, akan tetapi pengetahuan masih terlalu luas cakupan pemahamannya, dan dengan demikian pengetahuan bukanlah definisi dari kekuasaan.

Kekuasaan adalah sebutan atas predikat yang dilekatkan kepada penguasa sebuah negara untuk mengatur dan bertindak menurut apa yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dituntut dalam cara penguasa tersebut menguasai negara.

b) Sumber Kekuasaan

Aristoteles menganjurkan ketertundukan kekuasaan penguasa dalam sebuah negara kepada batasan atas dasar *hukum* sebagai sumber kewibawaan tertinggi. Hal itu terjadi dalam bentuk pemerintahan politeia yang konstitusional. Hukum berperan sebagai jaminan penyelenggaraan tujuan kesejahteraan umum, di mana masing-masing komponen negara memiliki kedudukan hukum yang jelas dan terarah. Yang pada akhirnya, hukum juga akan membantu terpupuknya moralitas bernegara yang baik.

Kekuasaan berdasarkan hukum, akan melahirkan empat konsekuensi:

- 1) Hukum akan memupuk moralitas dan keadaban bernegara;
- 2) Moralitas yang baik akan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah (penguasa); digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- 3) Kearifan kekuasaan akan memancing partisipasi positif dari rakyat yang diperintah; dan
- 4) Kondisi semacam itu akan mampu mengemban amanat tujuan kesejahteraan umum.³²

c) Pemegang Kekuasaan.

Pada dasarnya, perihal kekuasaan selalu digunakan oleh subyek yang memegangnya untuk memerintah terhadap pihak lain sepanjang yang

³² JH. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 55.

dikuasainya. Hal itu secara jelas mendasarkan bahwa dalam sebuah negara, kekuasaan selalu dipegang oleh penguasa yang kemudian disebut dengan pemerintah.³³ Kekuasaan dipegang oleh penguasa sesuai bentuk pemerintahan berdasarkan pertimbangan ideal, ia harus dipimpin oleh manusia terunggul dari yang terpilih, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan paling sempurna. Apakah itu kemudian dirupakan bagi mereka yang memegang kekuasaan di bidang kebijakan hukum atau peradilan, para pejabat di pos-pos pemerintahan atau birokrasi, ataupun bagi mereka yang ada dalam angkatan bersenjata. Di sini Aristoteles memaklumi bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh kalangan bersenjata karena alasan kekuatan mereka untuk memaksa warga negara.³⁴ Juga bahwa kekuasaan memang memiliki muatan untuk cenderung berbentuk kekerasan atau perilaku kasar.³⁵

Oleh karena kenyataan semacam itu sulit sekali terwujud, maka kekuatan kekuasaan dialihkan pada adanya kekuatan hukum yang berfungsi sebagai aturan tertinggi. Keputusan yang diambil dari banyak orang secara kolektif akan jauh lebih baik dan lebih terhindar dari penyelewengan. Makanya amanat kekuasaan paling realistis dipegang oleh kaum menengah, strata paling besar-pemangkul senjata, yang tunduk pada hukum.

Kekuasaan yang dipegang oleh penguasa ini, sebagaimana dalam konsekuensi-konsekuensi yang terdapat dalam sumber kekuasaan di atas

³³ Dalam pengertian ini, Aristoteles menganggap sebagai sebuah lelucon terhadap bentuk kekuasaan yang tidak digunakan untuk memerintah. Lihat *Politic*, Buku-III, 1.

³⁴ William Jowet, *Great Books, Politic*, Buku-III, 5.

³⁵ William Jowet, *Great Books, Politic*, Buku-III, 3.

berarti tetap ada kesimpulan yang tetap mempertimbangkan hukum sebagai institusi yang masih tetap utama dalam hal pemegang kekuasaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
d) Penyelenggaraan Kekuasaan.

Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan, Aristoteles terlebih dahulu menetengahkan beberapa model pemerintahan yang dianggap berhubungan erat dengan model kekuasaan yang akan diselenggarakannya. Sebagaimana yang telah diulas di muka, bahwa terdapat tiga model pemerintahan yang identik dengan manajemen kekeluargaan (*household management*). Oleh karenanya perlu dibedakan secara jelas antara bentuk pemerintahan dengan model penyelenggaraan pemerintahan, walaupun keduanya memiliki hubungan yang sangat berkaitan.

Bentuk pemerintahan meliputi; pemerintahan monarki; pemerintahan aristokrasi; dan pemerintahan politeia (*konstitusional*). Sebagaimana keterangan di muka, Aristoteles memandang pemerintahan paling ideal adalah pemerintahan monarki yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang memiliki kualitas personal yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang unggul dari yang pilihan, yang memiliki kebijaksanaan sempurna, sebagaimana yang oleh Plato disebut sebagai raja filosof (*king philosopher*). Walaupun ideal, bentuk pemerintahan ini tidak realistis dan paling kecil kemungkinan terwujudnya. Sehingga Aristoteles lebih memilih yang dua lainnya, yakni aristokrasi dan ^{Politeia} demokrasi. Dan dalam pilihan-pilihan bentuk pemerintahan tersebut, Aristoteles akhirnya menuju pada pertimbangan-pertimbangan elementer menyangkut kepentingan dan keutuhan bersama

dalam sebuah negara. Karena Aristoteles memandang kedua bentuk pemerintahan tersebut masing-masing memiliki kelemahan dalam hal penyelenggaraan kekuasaan. Jika aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang lebih unggul, baik dalam hal kekayaan ataupun kekuatan tenaga (kalangan bersenjata) yang hal itu justru minimnya kontrol, maka dalam politeia, titik kekuasaan akhirnya akan dipegang oleh orang banyak yang miskin.³⁶ Hal itulah yang menyebabkan Aristoteles melihat kelemahan dalam politeia yang akan menjadi pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang akan dikuasai oleh warga negara yang miskin sehingga tidak akan dapat mewujudkan negara ideal.

Penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada tiga model hubungan dalam keluarga; hubungan antar tuan dan budak, hubungan antara suami dan isteri, dan hubungan antara ayah dan anak-anak.

Sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dilakukan melalui model hubungan.

- 1) Mastership(*despotikē*), pertuanan atau hubungan antara tuan dan budak;
- 2) *Matrimonial (gamikē)* untuk hubungan suami dan isteri; dan
- 3) *Paternalistik (teknopoiētikē)*, untuk hubungan ayah dan anak.³⁷

Penyelenggaraan kekuasaan dengan model suami dan isteri atau ayah dan anak berbeda dengan model tuan dan budak. Budak tidak memiliki kebebasan terhadap tuannya, sama halnya kekuasaan jiwa akan tubuh atau seorang tuan

³⁶William Jowet, *Great Books, Politic*, Buku-III, 5.

³⁷William Jowet, *Great Books, Politic*, Buku-I, 8.

dengan binatang peliharaannya. Model kekuasaan ini bersifat *despotis* (pengaturan paksa). Sedangkan isteri dan anak memiliki kebebasan terhadap suami dan ayahnya. Walaupun dari kebebasan keduanya masih dituntut sikap tunduk kepada suami dan ayah tersebut. Karena hal itu merupakan kodrat kemanusiaan, isteri diharapkan tunduk suami, dan anak pada ayahnya. Aristoteles menyebut model kekuasaan ayah kepada anaknya sebagai model kekuasaan seorang raja (*royal power*).³⁸

Penyelenggaraan kekuasaan paling baik adalah model suami dengan isterinya, yang dalam negara dianalogikan dengan penguasa negara dengan warga negara. Walaupun antara penguasa dan warga berbeda menurut kedudukan hukum, akan tetapi pada hakikatnya mereka sederajat dan sama dalam kebebasan dan hak bersuara dalam setiap periode pemilihan. Sebagaimana halnya suami-isteri, mereka sama dalam kedewasaannya. Penyelenggaraan pemerintahan kurang dapat baik jika dilaksanakan melalui *monarkial* layaknya ayah-anak ataupun *despotis* layaknya tuan-budak. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang selalu dilandasi oleh kesadaran akan kesetaraan derajat dan kebebasan.

Klasifikasi Aristoteles tentang pemegang kekuasaan (penguasa) memberikan bukti yang kuat bahwa keadaan dan jumlah pemegang kekuasaanlah yang menentukan keadaan sebuah negara. Ia menyatakan, baik-buruk sebuah negara terletak pada perhatian dan kepentingan yang diberikan oleh pemegang kekuasaannya. Apabila pemegang kekuasaan menitik-beratkan

³⁸William Jowet, *Great Books, Politic*, Buku-I, 8.

perhatian dan kepentingan terhadap nasib rakyat, maka negara tersebut menjadi baik. Akan tetapi jika mereka hanya memberikan titik berat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka negara tersebut adalah negara yang buruk.

Jika negara diperintah oleh satu orang, beberapa orang, atau banyak orang, maka klasifikasi yang ia utarakan tersebut bermaksud ingin menggambarkan karakter setiap pandangan seorang pemegang kekuasaan terhadap kekuasaannya. Artinya hasil dalam sebuah usaha untuk membentuk negara ideal berkembang seiring model dan karakter penguasaan seorang penguasa.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁹ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 187.

BAB III

DESKRIPSI FENOMENOLOGIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Sejarah Munculnya Fenomenologi

Istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh *J.H. Lambert*, seorang Jerman yang ahli matematika pada tahun 1764 untuk memaksudkan pada teori penampakan. Dalam empat disiplin filosofisnya di samping teori kebenaran, logika, dan semiotika. Dalam arti luas, fenomenologi disebut sebagai ilmu tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, fenomenologi merupakan ilmu tentang gejala yang menampakkan diri pada kesadaran manusia.¹

Pada tahun 1786 dalam *Metaphysical Foundations of Natural Science*, *Immanuel Kant* (1724-1804) menamakan prinsip-prinsip metafisika ilmu alam yang ia letakkan tersebut sebagai fenomenologi. Ia menguraikan gerak dan diam sebagai karakteristik umum yang menandai setiap gejala. Studi fenomenologi diperlukan guna membedakan antara dunia inderawi dan dunia intelejibel dalam rangka menghindari kekacauan metafisis antara keduanya. Dari asumsi dasar tersebut, Kant mengembangkan teori *dua dunia*, yakni dunia *fenomenon* dan dunia *noumenon*.

Fenomenon disebut juga sebagai *sensibilia* yang berarti penampakan (*appearances*) sejauh dipikirkan sebagai obyek-obyek sesuai dengan kesatuan kategori. Dunia yang hadir di depan manusia, yang ditentukan oleh bentuk-bentuk

¹Roger Scruton, *A Short History of Modern Philosophy* (New York: Routledge, 1995), 250.

intuisi dan kategori-kategori pemahaman. Adapun noumenon disebut sebagai *intelligibilia* yakni dunia di mana obyek-obyek yang ada tidak tergantung pada pikiran dan struktur pengetahuan manusia. Obyek-obyek ini hanya dapat dipahami melalui *rasio murni*.²

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), dalam *Fenomenologi of the Spirit* pada tahun 1807, berusaha merinci tahapan yang memungkinkan manusia untuk naik pada tingkat akal budi universal. Sebuah pengantar pada sistem metafisika yang luas, yang diciptakan untuk menelusuri evolusi kesadaran sebagai penerima fenomena atau penampilan. Dinyatakan bahwa pijakan awal filsafat adalah *being*, akan tetapi *being* yang dimaksud itu sesungguhnya adalah *pure being* atau ada murni yang universal. Dan tidak menunjuk pada sesuatu yang partikular atau *indeterminate being*.³

Pada masa *Edmund Husserl* (1859-1938), istilah fenomenologi dibakukan sebagai sebuah *Filsafat Pertama* atau *The First Philosophy*. Fenomena yang digambarkan secara tepat tanpa prasangka agar sampai pada fenomena itu sendiri (*zu den Sachen selbst*) adalah pelajaran pertama dalam filsafat. Husserl mengambil dasar itu dari gurunya, *Brentano*, yang lebih menekankan aspek psikologis dalam fenomenologi, karena pada dasarnya fenomenologi lebih mempengaruhi gerakan psikologi daripada gerakan filsafat pada awal pertumbuhannya. Fenomenologi telah menjadi sebuah metode untuk melukiskan

²Joko Siswanto, *Sistem Metafisika*, 66.

³Joko Siswanto, *Sistem Metafisika*, 74.

fenomena secara tepat.⁴ Penggambaran atau pelukisan ini secara metodologis, sekalipun dalam sebuah riset ilmiah, merupakan kebutuhan dasar dalam rangka mengadakan identifikasi terhadap fenomena sebagai obyek. Hal itu dilakukan sebelum bentuk-bentuk analisis eksperimental, atau reduksi-reduksi data lain terjadi. Penggambaran adalah langkah awal dalam setiap analisis.

Martin Heidegger (1889-1976) melanjutkan beberapa landasan yang telah dirintis oleh Husserl. Ia adalah salah seorang murid Husserl yang utama. Akan tetapi pada bagian lain, *Martin Heidegger* dianggap bukan filosof fenomenologi secara murni, karena di tangannya, filsafat fenomenologi menjadi berbeda arah dengan pendahulunya. *Martin Heidegger* lebih memilih pencarian makna-makna yang itu justru lebih mengarah kepada hermeneutika filosofis. Filsafatnya tidak secara tegas mengadakan pembatasan obyek kesadaran yang sesungguhnya merupakan thema utama fenomenologi.

G. Ryle dengan bukunya, *The Concept of Mind* (1949) bersama *L. Wittgenstein* dengan *The Philosophical Investigation* (1953), dengan warna yang agak berbeda keduanya memperlihatkan pengaruh fenomenologi yang ada di Inggris melalui kajian analitika bahasa.

Di Perancis, fenomenologi diperkenalkan oleh *Jean-Paul Sartre*, seorang tokoh utama eksistensialisme yang di dalam pemikiran filsafatnya, pengaruh fenomenologi Husserl jelas terlihat. Dalam *The Question of Method* (1957), diketengahkan sebuah pertanyaan, bagaimana subyek mengalami dunianya, serta

⁴Rom Harre dan Roger Lamb, *Ensiklopedi Psikologi*, terj. Danuyasa Asih Wardji (Jakarta: Arcan, 1996), 235.

arti-arti apa yang diberikan kepadanya. Usaha ini akhirnya dikembangkan lebih lanjut oleh rekannya, *Merleau-Ponty*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya secara berturut-turut, fenomenologi dikembangkan dan didokumentasikan oleh beberapa pemikir terakhir. Misalnya, *Schutz* dalam *Collected Papers* (1962). *Strasser* dalam *Phenomenology dan the Human Sciences* (1963). *Spiegelberg* dalam *The Phenomenological Movement* (1972). Dan *Natanson* dalam *Phenomenology dan the Social Sciences* (1973). Serta yang terakhir dan paling besar, *Merleau-Ponty* dalam *Phenomenology dan the Sciences of Man* (1973). Dari beberapa dasar yang dijadikan bahan penelitian tentang fenomenologi tersebut terdapat benang merah bahwa fenomenologi dapat ditarik dari landasan psikologi sehingga hubungan antara keduanya adalah erat sekali. Juga bahwa ilmu-ilmu kemanusiaan bisebagaia mengambil landasan analisis dari fenomenologi.

B. Tokoh Fenomenologi dan Garis Besar Pemikirannya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Edmund Husserl (1859-1938).

Fenomenologi lazim dikaitkan dengan Edmund Husserl sebagai *bapak* fenomenologi. Husserl sendiri sebenarnya adalah profil seorang berkebangsaan Austria yang belajar sains, matematika, dan filsafat pada universitas Leipzig, Berlin. Dalam karya pertama, *Philosophie der Arithmetik*, pemikiran filsafat yang hendak diajukannya belum begitu tampak.

Ia adalah salah satu murid *Franzz Brentano* (1838-1917) dan merasa berhutang budi pada gurunya itu. Melalui ceramah-ceramah Brentano di Wina pada sekitar tahun 1888 yang berjudul *Phenomenology* yang mengetengahkan

tentang *Psikologi Deskriptif*, serta beberapa persoalan tentang pembagian fenomena fisik dan fenomena psikis. Serta adanya *intensionalitas* yang membedakan fenomena psikis dari fenomena fisik. Husserl melanjutkan sekaligus meluruskan beberapa point yang diberikan oleh Brentano. Terutama mengenai sikap fenomenologi terhadap metode yang digunakan dalam ilmu alam. Jika Brentano mengadopsi metode ilmu alam sebagai basis analisisnya maka Husserl memilih metodenya sendiri, metode fenomenologi.⁵

Brentano membedakan antara introspeksi, pemeriksaan-diri secara sengaja yang mungkin salah, dan persepsi-dalam, kesadaran langsung tentang gejala psikis kita sendiri-suatu kesadaran yang menyertai semua pengalaman, dan sempurna. Fungsi dasar kesadaran adalah menggambarkan. Emosi menilai dan merasa, keduanya tergantung pada representasi. Kesadaran harus sadar tentang sesuatu, dan fungsi itu disebut *intensionality*. Filsafat fenomenologis tergantung pada penggambaran obyek-obyek kesadaran sebagaimana tampil, yakni sebagai representasi. Akan tetapi menurut Husserl, filsafat memberi gambaran gejala murni, dengan pengalaman-pengalaman, tanpa memandang apakah itu mengacu pada obyek yang ada secara kongkret, atau pada fiksi, atau pada dirinya sendiri. Untuk mencapai hal itu, seorang filsuf harus melalui sebuah pendekatan pendekatan *epoche* (meletakkan dalam tanda kurung) sebagai langkah awal dalam mendekati persoalan eksistensi sambil menggali *esensi-esensi* setiap fenomena.⁷

⁵Bernard Delfgaauw, *Filsafat Abad 20*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1988), 105.

⁶Rom Harre dan Roger Lamb, *Ensiklopedi Psikologi*, 235.

⁷Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 235.

Selain membawa pengalaman, kesadaran juga memiliki peran kreatif.

Kesadaran menciptakan obyek-obyek pengalaman, yang tanpa itu, obyek pengalaman akan merupakan masa data yang kacau, tidak terlukiskan, dan berulang. Dari sini tampak sekali pengaruh pemikiran saat ia bermitra di bawah bimbingan psikolog, *Carl Stumpf* (1848-1936). Pemikiran yang dipengaruhi oleh Kant, sehingga Husserl disebut-sebut sebagai tokoh Neo-Kantianisme.

Latar belakang lahirnya fenomenologi Husserl adalah adanya krisis filsafat yang mengiringi runtuhnya rasionalisme kemanusiaan yang berkembang di Barat. Ia mengkritik *psikologisme* yang diajukan oleh *John Stuart Mill's*. Husserl memandang terdapat kekacauan antara logika dan pengetahuan manusia bersama dengan kehadiran aksi-aksi psikis. Husserl percaya bahwa psikologi dapat dijelaskan melalui kondisi-kondisi empirik dalam pengetahuan manusia. Akan tetapi isi keputusan dan kebenaran dalam penjelasan tersebut harus melalui kejelasan struktur secara terpisah (*distinctive structure*).

Untuk menajadi ilmu pengetahuan yang baku (*rigorous science*), filsafat harus;

- a) Menghindari untuk tidak menguji presupposisi- presupposisi;
- b) Meneliti secara murni awal dan asal sebuah pemikiran dan nilai;
- c) Membangun kebenaran dan evidensi langsung sehingga tidak dapat diragukan lagi; dan

⁸James Collins, *The Encyclopaedia Americana*, vol. 14, ed. Americana Corporation (Connecticut: Grolier Incorporated, 1993), 617.

- d) Usaha-usaha tersebut harus ditujukan untuk kembali ke benda-benda itu sendiri.⁹

Thema dasar fenomenologi Husserl adalah intensionalitas, reduksi-reduksi, serta dunia-kehidupan. Pemikiran dan aksi, secara esensial adalah intensionalitas kesadaran yang terhubung secara langsung dengan arti obyek-obyek itu sendiri. Hal itu merupakan jalan agar kita dapat kembali kepada pengalaman-pengalaman dalam dunia di mana segala makna dikonstitusikan.

Dalam reduksi-reduksinya, Husserl membagi dalam tiga tahap untuk menjelaskan proses perjalanan antara kesadaran, pengalaman, serta obyek-obyek. *Pertama*, *epoché* atau penangguhan (*suspension*) atas pemahaman dogmatik tentang realitas dunia yang terberikan (*world's given reality*). Usaha tersebut menggunakan jalan penempatan realitas dalam pengurangan-pengurangan.

Kedua, reduksi eidetik (*eidetic reduction*), Husserl menyebutnya sebagai bentuk serta struktur esensial dari obyek-obyek yang berkumpul dengan perspektif pemahaman manusia yang beragam tentang obyek-obyek tersebut.

Ketiga, disebut sebagai reduksi transendental (*transcendental reduction*), pembahasan tentang ego murni atau kesadaran murni. Perbuatan manusia yang terjadi dalam dunia dengan dunia itu sendiri harus diupayakan melalui sebuah kompromi untuk menentukan arti benda-benda. Dunia-kehidupan adalah dasar bagi pengalaman hidup kita. Keduanya berguna untuk memberikan ukuran bagi penentuan persepsi sehari-hari manusia serta dalam usaha menghasilkan konsep pengetahuan. Filsafat Husserl selalu mempermasalahkan hubungan perpaduan

⁹James Collins, *The Encyclopaedia Americana*, 617.

antara ego murni dengan dunia-kehidupan, antara *Erlebnisse* dan *Lebenswelt*.

Sekaligus mempermasalahkan kehidupan intersubyektifitas antar individu-individu.¹⁰

2. Martin Heidegger (1889-1976).

Dalam fenomenologinya, Heidegger mengajukan tiga persoalan pokok. Masing-masing, siapakah manusia itu? Apakah Ada yang kongkret? Dan apakah Ada yang tertinggi?

Pertama, berkaitan dengan pertanyaan tentang hakikat manusia, apakah aku Ada? Ia memberikan ulasan, manusia adalah makhluk yang terlempar kekuasaan dunia tanpa persetujuannya sendiri. Oleh karena itu manusia adalah terbatas kemampuannya. Dalam menghadapi sebuah ketiadaan manusia menjadi merasa kurang dan gelisah. Dan dari kegelisahan inilah manusia menjadi sadar akan keterbatasannya. Manusia menjadi sadar akan keberadaannya, sehingga ia dituntut untuk mempelajari dirinya sendiri. Selanjutnya manusia menemukan soal-soal temporalitas, takut, khawatir, dosa, minder, ketiadaan, dan mati.

Walaupun demikian Heidegger menganggap bahwa manusia modern hidup secara dangkal, sangat memperhatikan benda, kuantitas, dan kekuasaan pribadi. Kehidupan manusia modern kosong, tidak berakar, dan mulia kehilangan rasa akan Ada yang sesungguhnya. Dan untuk menghindari hal itu maka manusia harus tidak tergoda hanya hidup dalam benda-benda sehari-hari. Ia harus

¹⁰MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, 114.

¹¹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 237.

meningkatkan dirinya pada sisi dinamis dalam eksistensinya, lebih dinamis di atas kekuasaan benda-benda.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Benda kongkret harus ditingkatkan sehingga manusia mampu menjamah keterbukaan Ada secara keseluruhan. Manusia harus hidup secara autentik, dengan tidak tergoda pada benda-benda kongkret. Ia harus berusaha menemukan Ada yang sesungguhnya sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya ia miliki, jika ia menginginkannya.

Inti dari fenomenologi Heidegger adalah eksistensi manusia, di mana manusia mengalami dunianya dan ia hidup di dalam dunia. Berkenaan dengan pertanyaan tentang 'ada' manusia, ia memandang bahwa ada manusia adalah mengadanya yang bereksistensi. Eksistensi yang dimaksud adalah meloncat keluar dari dirinya. Mengada adalah mengada di luar dirinya. Saya mengada dalam dunia bukan berarti saya termaktub oleh dunia tetapi saya yang menempati dunia.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).

Ia adalah teman dari Jean Paul Sartre yang sama-sama aktif pada jurnal ilmiah di Perancis, *Les Temps Modernes*. Ponty jelas terinspirasi oleh kedua pendahulunya, Husserl dan Heidegger. Akan tetapi corak pemikiran Ponty diketahui tetap berbeda dengan kedua pendahulunya tersebut. Karena ia tidak terburu-buru mencoba membuat suatu sistem, akan tetapi hanya mencari pertanyaan-pertanyaan dari keheranan terhadap teori-teori pendahulunya. Dasar hipotesanya menyatakan bahwa pengetahuan manusia selalu fragmentaris (dapat

¹²MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, 116.

selalu dipisah), sehingga tempat-tempat yang jelas dapat dipisahkan dengan yang gelap.¹³ Padahal ada kemungkinan besar di saat para filosof mengatakan dengan terang dan jelas, sebenarnya ia tidak menyadari akan adanya wilayah yang gelap tadi. Inilah yang kemudian membuat Ponty curiga bahwa para filosof pendahulu masih perlu bertanggung jawab atas beberapa pertanyaan yang ia ajukan tersebut.

Mengenai thema *intensionalitas* yang pokok dalam fenomenologi, Ponty berbeda pandang dengan Husserl yang menjelaskannya melalui hubungan kesadaran dengan obyeknya (pengenalan). Menurut Ponty, kesadaran dan obyek harus ditarik sedemikian rupa sehingga intensionalitas berarti kaitan antara subyek manusia dengan dunianya. Kaitan subyek dengan dunianya adalah *pra-refleksif*, dengan arti mendahului refleksi kesadaran. Dari situ intensionalitas tidak lagi dalam taraf pengenalan akan tetapi suatu tahap eksistensi.¹⁴

Adapun semboyan Husserl, kembali kepada benda-benda itu sendiri (*lebenswelt*), dimaknai Ponty sebagai usaha untuk kembali kepada pengalaman. Pengalaman adalah tempat tumbuh segala makna dan kebenaran. Dari sini fungsi filsafat ditegaskan sebagai pengulas isi pengalaman secara eksplisit.¹⁵ Dari sini pula dapat dilihat bahwa *obyek* yang dimaksud oleh Husserl, dalam Ponty telah dipandang sebagai *dunia yang dialami*.

Menurut dia, seorang filsuf harus memulai kegiatan filsafatnya dengan penelitian terhadap pengalaman dirinya sendiri mengenai yang nyata. Hal itu

¹³MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, 120.

¹⁴K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 132.

¹⁵K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, 133.

berguna bagi seorang filsuf, karena dengan demikian akan dapat mencegah dari dua segi pemahaman ekstrim. *Pertama*, pemahaman dihasilkan hanya dengan mengulangi atau mengadakan pembahasan tentang pemikiran orang lain tentang realitas tersebut. Yang *kedua*, pemikiran yang hanya memperhatikan segi-segi luar dari pengalaman, justru tanpa meneliti realitas itu sendiri.

Merleau-Ponty telah memasukkan pengertian dialektika dalam fenomenologi, dengan alasan bahwa dialektika adalah ciri hakiki bagi filsafat. Dalam karyanya, *Les aventures de la dialectique*, dinyatakan bahwa dialektika antara *subyek* dan *obyek* adalah *sahih* dan dialektika tersebut harus tetap kabur (*absurd*). Absurditas tersebut lahir karena kejadian dalam dunia adalah proses sedangkan proses adalah sesuatu yang belum selesai sehingga tidak mungkin diramalkan secara jelas. Deskripsi fenomenologis tidak dapat menggambarkan dunia dengan sudah selesai. Dan yang hanya dapat dideskripsikan adalah hal-hal yang telah terjadi.

Alam mempunyai arti melalui sejarah. Sedangkan sejarah yang benar adalah sejarah yang melalui dialektika subyek-obyek. Dunia, dalam sejarahnya tidak mengikuti contoh yang sudah dikonsepsikan. Oleh karenanya, pemahaman kita tentang dunia adalah bergantung pada sejauh mana manusia mampu mempertinggi kualitas akal budinya sedemikian rupa sehingga dapat mencakup yang rasional maupun yang non-rasional.¹⁶

Dari pemikiran inilah, Merleau-Ponty disebut sebagai *filsuf absurditas*, dengan menghubungkan perhatian filsafat dari yang kontingen kepada yang

¹⁶Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 238.

absurd. Dari yang ada dalam sisi terang benda-benda kepada sisi gelap benda. Dan pemikiran filsafat yang demikian itu hanya merupakan bentuk kesetiaan manusia terhadap tugas akal itu sendiri. Akal mempunyai tugas untuk berpikir secara tidak terbatas.

C. Fenomenologi Sebagai Metodologi Filsafat

Sebagai kumpulan atas beberapa metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil, sehingga manusia sampai kepada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan mengupayakan diri untuk menggambarkan ciri intrinsik dari setiap gejala sebagaimana gejala tersebut membuka atau menyingkapkan dirinya terhadap kesadaran manusia.¹⁷

Tolakan awal langkah fenomenologis adalah dengan kembali kepada kesadaran manusia atau manusia bersama kesadarannya. Manusia yang subyektif tersebut harus kembali kepada *kesadaran murni* dengan jalan membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, pembebasan diri tersebut hanya akan menyisakan *intuisi esensi* atau gambaran yang hakiki.

Fenomenologi mengajarkan bahwa setiap pengetahuan manusia harus didasari atas pengembalian pengamatan kepada obyek benda-benda bukan atas subyektifitas pemikiran. Dimaksudkan agar benda-benda tersebut secara *eidetik vision* menampakkan dirinya sendiri secara murni dan kesadaran dapat menangkapnya secara langsung. Dalam melakukan pengamatan terhadap obyek

¹⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 236.

yang menampakkan diri kepadanya, subyek tidak dapat mengikuti pengandaian-pengandaian tersebut dengan sistem kepercayaan, penilaian, maupun asumsi-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id asumsi simpatik. Dalam proses abstraksi tersebut, kesadaran subyek harus ditaruh tdana kurung (*epoche*) untuk memverifikasi pengetahuan mana yang benar-benar murni tidak mengandung asumsi-asumsi nilai belaka. Pengetahuan murni yang lahir dari hakikat obyek dengan jalan penampakan dirinya (*eidos*) dan kemudian mengkonstitusikan dirinya kepada kesadaran. Bagi Husserl, istilah '*Zu den Sachen selbst*' (langsung melihat apa yang dibicarakan) merupakan pemahaman lain dari proposisi, bahwa pengetahuan sejati adalah kehadiran data dalam kesadaran budi, bukan rekayasa pikiran untuk membentuk pengandaian atau teori.¹⁸

Inti dari metode fenomenologi adalah intensionalitas, konstitusi yang dihasilkan melalui aktifitas akomodasi, konvergensi, dan fiksasi dari mata subyek terhadap obyek yang lepas dan terpisah dari dirinya. Dasar ini membawa digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id konsekuensi atas keharusan terpenuhinya melihat obyek berdasarkan gejala-gejala yang menghubungkan antara obyek dengan kesadaran subyek, bahwa keduanya merupakan suatu lingkaran putar yang saling terhubung erat. Selain itu, konsekuensi ini juga menghalangi tercapainya logika Aristoteles, bahwa setiap benda sesungguhnya adalah identik dengan dirinya sendiri. *Brentano* mengulas secara sederhana bahwa intensitas yang terdapat dalam fenomenologi adalah kemustahilan adanya hal yang dilihat tanpa adanya hal yang melihat.¹⁹ Manusia

¹⁸Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 6.

¹⁹MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologi* (Jakarta: Gramedia, 1984), 5.

menampakkan diri sebagai hal yang transenden, sintesa dari subyek dan obyek. Ia adalah *etre au monde* (mengada pada alam) yang berarti-*alam yang ia alami*. Ia harus melihat gejala dirinya (badan dan jiwa) yang ia alami pada alam tanpa banyak pikir sebagai intuisi pra-abstraktif. Manusia bukan keterpisahan antara raga dan jiwa, ia bukan mayat dengan hantu di dada, sebagaimana fisiologi yang diberikan oleh *Descartes*. Fenomenologi memandang manusia sebagai badan subyek yang mengkonstitusikan diri pada alam dengan cara mensituasikan diri terhadapnya. Manusia adalah bukan manusia yang identik dengan dirinya sendiri. Ia adalah kondisi mensituasikan diri dengan alamnya. Konstitusi yang terdiri dari *alam* yang tidak sadar (yang disadari) dengan *dunia* kesadaran (yang menyadari). Antara *monde* dan *monde vecu*, *welt* dan *lebenswelt*, atau antara *world* dan *subconscious world*.

Fenomenologi sebagai cara serta metode dalam mendekati permasalahan tidak pernah mengajukan suatu sistem pemikiran secara eksklusif. Ia bukan suatu ilmu, sistem, hipotesa, ataupun teori. Ia lebih merupakan suatu metode pemikiran, *a way of looking at things*. Dengan demikian fenomenologi dapat diterima lebih luas oleh beberapa perspektif bidang kajian keilmuan menurut keperluan penelitiannya masing-masing disebabkan ia hanya merupakan pisau analisa dalam mendekati obyek kajian. Menurut Husserl, fenomenologi adalah '*Scientia universalis*' yang berawal dari *wesensschau* (melihat gejala sebagai esensi, gejala murni) sebagai reduksi atas pelebaran pengamatan manusia atas pemikirannya yang sewenang-wenang.²⁰

²⁰MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, 9.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fenomenologi sebagai filsafat berisi beberapa metode untuk mendekati obyek secara murni. Metode-metode tersebut di antaranya adalah; metode pemurnian kesadaran atau *lebenswelt*, deskripsi fenomenologis, reduksi atau pengurungan (*epoche*), serta cara membebaskan kesadaran dari konsepsi masa lalu untuk mengalami dunianya sendiri.

D. Deskripsi Fenomenologis

1. Filsafat Sebagai Deskripsi fenomenologis²¹

Fenomena merupakan sesuatu yang melalui cara tertentu menampilkan diri dalam kesadaran manusia. Baik merupakan penampilan riil maupun penampilan simbolik.²² Ia dapat berupa hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata.

Fenomena dibagi menjadi dua; fenomena fisik (*wilayah yang berisi muatan utama*) dan fenomena psikis (*berisi aksi-aksi*). Fenomena fisik masuk di dalamnya sesuatu sebagaimana obyek dalam dirinya sendiri. Kemudian, intensional, immanen, atau mental adalah muatan yang mengisi obyek tersebut dan akhirnya obyek tersebut berubah menjadi fenomena psikis.

Sedangkan fenomenologi berfungsi sebagai metode yang tidak memalsukan fenomena. Ia memiliki orientasi untuk mendeskripsikannya sebagaimana

²¹Th. de Boer, *The Development*, 57.

²²Kedua penampilan ini bisa diibaratkan dengan penampilan sebuah rumah. Penampilan riil adalah penampilan rumah secara langsung ke dalam kesadaran subyek, sedangkan penampilan simbolik adalah kabar tentang rumah yang sampai kepada kesadaran subyek melalui tanda-tanda akan rumah tersebut. Lihat Th. de Boer, *The Development*, 12.

penampilannya.²³ Deskripsi fenomenologi sebagaimana latar belakang diletakkannya, merupakan metode di mana subyek harus menanggalkan segala prasangka, pra-anggapan, serta segenap teori untuk dapat memusatkan diri dan sampai kepada fenomena secara murni.

Husserl tetap beranggapan bahwa fenomenologi adalah sebuah metode filsafat yang transendental, tidak sama dengan ilmu-ilmu alam yang positif. Walaupun ia adalah seorang murid langsung dari Brentano, akan tetapi ia menyatakan ketidaksetujuan dengan gurunya tersebut terutama mengenai model pendekatan fenomenologi melalui pendekatan ilmu alam positif. Hal ini secara otomatis mempengaruhi tentang pandangan Husserl tentang psikologi.

Husserl dikenal anti psikologisme, dengan berarti bahwa fenomenologi sama sekali lain dengan psikologi walaupun keduanya memiliki tugas melukiskan corak-corak esensial (*wesensschau*).²⁴ Ide yang dikemukakan oleh Husserl inilah yang kemudian dimengerti sebuah batasan yang tipis sekali antara realisme yang dengan idealisme di mana di antara keduanya fenomenologi berposisi.²⁵ Fenomenologi bersifat pra-teoritik, di mana kesadaran tidak berhak menentukan penampilan fenomena-fenomena, sebagaimana idealisme. Akan tetapi pada saat yang lain fenomena yang menampilkan diri kepada kesadaran tersebut pada

²³Bernard Delfgaauw, *Filsafat abad 20*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1988), 105.

²⁴MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, 114.

²⁵B. Delfgaauw, *Filsafat Abad 20*, 105.

akhirnya jelas tidak akan dapat melepaskan diri dari kesadaran itu sendiri, sebagaimana realisme.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada akhirnya, terdapat istilah fenomenologi psikologis atau psikologi fenomenologi yang juga memiliki tugas yang sama yakni mengadakan pengamatan terhadap corak-corak secara esensial. Dan itu dilawankan dengan psikologo empiris yang hanya melihat fakta-fakta dengan sikap biasa.²⁶

2. Deskripsi Fenomenologis.

Ada dua alasan mengapa deskripsi fenomenologi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar-dasar yang diletakkan Brentano dalam deskripsi psikologinya. Alasan tersebut adalah;

- a) Brentano menyamakan antara deskripsi psikologis dengan deskripsi fenomenologis.
- b) Husserl sendiri menempatkan deskripsi psikologis sebagai perangkat kedua dalam metode fenomenologi.²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terdapat beberapa point ketetapan Brentano yang berfungsi sebagai kriteria pembeda antara deskripsi psikologi dengan genetika psikologi. Berikut ini adalah turunan deskripsi psikologi yang kemudian disamakan dengan deskripsi fenomenologi;

²⁶MAW. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, 114.

²⁷Th. de Boer, *The Development*, 57.

- a) Deskripsi fenomenologi adalah a-priori dan murni;
- b) Deskripsi fenomenologi memiliki karakter; bahwa seluruh konsepnya dapat diteliti dengan jalan dilawankan dengan intuisi, sehingga menjadi jelas.

Tidak terdapat konsep hipotetik dalam deskripsi fenomenologi;

- c) Deskripsi fenomenologi adalah ruang bagi analisa yang orisinal, untuk megklasifikasikan fenomena; konsep orisinal tentang kebaikan dan konsep nilai yang ada pada intusi kongkrit di dalam fenomena;
- d) Deskripsi fenomenologi juga berperan untuk menemukan nilai sebuah ilmu pengetahuan;
- e) Terdapat dua fungsi bagi analisa murni;
 - 1) Sebagai masa persiapan dalam tahap fenomenologi genetik, di mana ia memberi muatan isi secara jelas.
 - 2) Dengan posisi untuk menemukan nilai ilmu pengetahuan, analisa ini mengadakan penelitian tentang ide kebenaran atau ide kebaikan murni.

Analisa ini mencoba menemukan dasar bagi nilai-nilai.

- f) Deskripsi fenomenologi tidak termasuk ilmu pengetahuan empirik, akan tetapi ilmu pengetahuan a-priori. Ia adalah fenomenologi murni. Fenomenologi yang bebas dari gejala fisik, dan ia adalah semata-mata ilmu pengetahuan mental yang murni.²⁸

²⁸Th de Boer, *The Development*, 52.

BAB IV

ANALISA PERMASALAHAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Analisa Deskriptif

Bab II berisi tampilan konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles, bab ini menjadi obyek pembahasan. Sedangkan Bab III berisi paparan deskripsi fenomenologis, bab ini menjadi perangkat analisa atas obyek. Keduanya bab tersebut telah dipaparkan dalam uraian terdahulu dan semua data yang dipaparkan dalam uraian bab-bab di muka adalah data yang digali dari beberapa sumber tanpa disertai komentar penulis. Oleh karena itu, uraian yang telah dikemukakan hanya berupa penyebutan ulang dari beberapa sumber tentang thema yang dituju. Dan sesuai dengan rumusan masalah, sebagai obyek bahasan, maka bab II akan digambarkan menurut operasi deskriptif yang telah disebutkan pada bab III.

Seperti pernyataan yang telah dilontarkan dalam bab III, setiap sebelum melakukan analisa terhadap obyek tertentu, deskripsi mutlak diperlukan.

Bagaimana seseorang akan memberikan analisa mengenai sesuatu obyek jika sebelumnya ia tidak mengetahui gambaran yang akan dianalisanya. Tidak ada analisa yang dikerjakan tanpa didahului deskripsi¹ Dengan alasan itu setidaknya dapat dikemukakan dua hal tentang deskripsi yakni; *pertama*, setiap deskripsi mutlak diperlukan pada setiap analisa; dan *kedua*, deskripsi fenomenologis adalah metode khusus dan terbatas dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati

¹Zafar Bangash, et.al., *In Pursuit of The Power of Islam; Major Writings of K. Siddiqui* (London: The Open Press, 1996), 161.

sebelumnya (dalam hal ini menggunakan operasi deskriptif Brentano). Kedua asumsi tersebut akan dijadikan dasar pemahaman deskripsi fenomenologis dengan kaitan bagaimana metode tersebut digunakan sebagai pisau analisa terhadap obyek, yakni konsep kekuasaan Aristoteles.

Deskripsi fenomenologis sendiri memiliki kriteria; a-priori dan murni; seluruh konsepnya dapat diteliti dengan jalan dilawankan dengan intuisi, sehingga menjadi jelas; tidak terdapat konsep hipotetik; ia adalah ruang bagi analisa yang orisinal, untuk megklasifikasikan fenomena: konsep orisinal tentang kebaikan dan konsep nilai yang ada pada intuisi kongkrit di dalam fenomena; berperan untuk menemukan nilai sebuah ilmu pengetahuan; terdapat dua fungsi bagi analisa murni: 1) sebagai masa persiapan dalam tahap fenomenologi genetik, di mana ia memberi muatan isi secara jelas dan 2) punya posisi menemukan nilai ilmu pengetahuan (mengadakan penelitian tentang ide kebenaran serta ide kebaikan murni atau menemukan dasar bagi nilai-nilai); dan yang terakhir, deskripsi fenomenologi tidak termasuk ilmu pengetahuan empirik, ia adalah fenomenologi murni. Fenomenologi yang bebas dari gejala fisik, dan ia adalah semata-mata ilmu pengetahuan mental yang murni.

Konsep kekuasaan Aristoteles yang diambil dari beberapa sumber, setidaknya dapat diklasifikasi melalui sebuah pembagian dalam rangka tujuan bagi kemudahan pemahaman. Kekuasaan merupakan thema yang terangkum dalam ide Aristoteles tentang negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dalam dunia politik. Pemahaman ini tetap disepakati sebagai batasan pada wilayah mana kekuasaan diperbincangkan. Karenanya, konsep kekuasaan

yang dikemukakan oleh Plato tidak dapat dijadikan bahan analisa perbandingan dalam identifikasi ini, karena maksud kekuasaan Plato bersifat lebih umum yakni ide kekuasaan dalam hidup manusia.

Untuk memberikan klasifikasi yang diinginkan secara sistematis akan dipergunakan pembagian yang diajukan oleh JH. Rapar dalam buku Filsafat Politik Aristoteles. Pembagian tersebut meliputi;

1. Sumber Kekuasaan.
2. Pemegang Wewenang Kekuasaan.
3. Model Penyelenggaraan Kekuasaan.

Ketiga klasifikasi kekuasaan tersebut selanjutnya akan dideskripsikan secara fenomenologis pada masing-masingnya.

B. Deskripsi Fenomenologi kekuasaan

1. Sumber Kekuasaan.

Terdapat beberapa pokok pemahaman dapat diambil sebagai kesimpulan atas uraian yang diberikan oleh Aristoteles pada penjelasan terdahulu, pokok-pokok tersebut adalah;

- a) Sumber kekuasaan harus terletak pada hukum.
- b) Hukum terwujud dari kesepakatan (konstitusi) negara itu sendiri.
- c) Karena telah disepakati, hukum akan memupuk moralitas dan keadaban bernegara.
- d) Moralitas yang baik akan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah (penguasa).

e) Kearifan kekuasaan akan memancing partisipasi positif dari rakyat yang diperintah.

f) Kondisi semacam itu akan mampu mengemban amanat tujuan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, hukum sebagai sumber kekuasaan, kesewenang-wenangan penguasa (pemerintah) dalam negara akan dibatasi sedemikian rupa, sehingga semua proses politik yang terjadi di dalamnya telah mendapatkan jaminan kepastian hukum. Antara penguasa dan yang dikuasai (warga negara) di hadapan hukum mendapat posisi yang sama. Yang membedakan hanya semata-mata perbedaan posisi secara politis. Penguasa bertugas mengatur pemerintahan dan warga negara berkewajiban berpartisipasi secara aktif.

Dari sini dapat dipahami bahwa jika kekuasaan telah benar-benar didasarkan atas hukum, apapun bentuk pemerintahannya, apakah itu monarki, aristokrasi, ataupun politeia, maka negara akan terhindar dari kekacauan terutama dalam hal penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh penguasa (dalam tyrani atau oligarki) atau penggunaan tuntutan hak warga negara secara sewenang-wenang (dalam demokrasi) akan dapat dihindari melalui jaminan hukum. Sehingga hal yang terpenting dalam pengusahaan negara ideal bukan terletak pada bentuk-bentuk pemerintahan yang baik, akan tetapi bagaimana diusahakan adanya hukum yang terbaik bagi negara.

Selanjutnya, proses pembuatan hukum atau kesepakatan yang berfungsi untuk melahirkan hukum seharusnya dilakukan oleh banyak orang dan ini hanya terjadi dalam bentuk pemerintahan politeia, di mana penguasa terdiri atas banyak

orang sebagai wakil dari seluruh warga negara. Keputusan yang diambil dari banyak orang secara kolektif akan jauh lebih baik dan lebih terhindar dari penyelewengan.

Dalam bentuk monarki atau aristokrasi, sebenarnya dimungkinkan untuk menciptakan sebuah hukum yang baik, akan tetapi oleh karena pada kenyataan, pembuat kebijakan hanya terletak pada satu atau beberapa orang maka dikhawatirkan adanya pemanfaatan hukum bagi kepentingan pembuatnya. Oleh karenanya, kaitannya dengan bentuk pemerintahan, amanat kekuasaan paling ideal dipegang oleh seorang (*king philosopher*) atau beberapa orang (aristokrasi), akan tetapi paling realistis dipegang oleh banyak orang. Dan menurut Aristoteles mereka terdiri dari kaum menengah dan para pemanggul senjata yang kesemuanya tunduk pada hukum.

Pemahaman yang diberikan Aristoteles mengenai kekuasaan, antara kaitan hukum dan bentuk pemerintahan, secara kontekstual dapat dipandang sebagai pemahaman yang cukup bijaksana walaupun masih sangat sederhana. Dengan kata lain, formulasi Aristoteles belum sampai pada pemilahan, antara pembuat hukum, penguasa, dan wakil warga negara.

Dari beberapa contoh kasus yang diteliti oleh Aristoteles tidak menunjukkan pemilahan antara hukum, penguasa, dan warga negara. Misalnya, pada kasus kesepakatan kerjasama antara dua negara yang menyebabkan penggabungan kedua wilayah negara menjadi satu, yakni *Tyrrhenians* dan *Chartaginians*. Keduanya tidak melakukan penggabungan kekuasaan atau menentukan bentuk pemerintahan baru. Hanya terdapat ikatan tertulis berbentuk hukum yang

mengatur hak dan kewajiban keduanya. Dalam satu wilayah yang sama ternyata keduanya dapat mengusahakan kebaikan bersama dan mencapai tujuan bersama.

Kekuasaan tertinggi tetap berada pada hukum tertulis yang telah disepakati bersama. Artinya, dalam hal ini hukum tetap sebagai perhatian utama sebagai perangkat yang menjamin penggunaan kekuasaan.

Dari keterangan di atas dapat dipahami berkaitan tentang sumber kekuasaan, bahwa ide kebaikan menurut Aristoteles tetap sebagai pertimbangan utama atas tujuan negara, yakni kebaikan tertinggi (*the highest good*) dan posisinya jauh lebih penting dari pada sekedar bentuk pemerintahan. Persoalan kesenjangan idealitas dengan realitas mengenai bentuk pemerintahan menjadi pertimbangan tersendiri. Apa gunanya pemerintahan yang ideal jika ia tidak mampu mewujudkan kebaikan secara riil. Tujuan negara bukan untuk negara maupun untuk kebaikan itu sendiri akan tetapi untuk manusia yang menjadi warganya, secara umum. Negara bertujuan memanusiakan manusia, yakni manusia yang selalu ingin untuk berpolitik, *zoon politikon*. Manusia yang ada di antara posisi dewa (*superhuman*) dan hewan (*subhuman*).

2. Pemegang Kekuasaan.

Aristoteles mengemukakan beberapa kesulitan mengenai siapa yang berhak memegang kekuasaan politik. Apakah kekuasaan dipegang oleh mereka berdasarkan pertimbangan jumlah orang, besar kekayaan, kepandaian atau tingkat pengetahuan, ataukah pertimbangan pemilikan kekuatan secara fisik. Pada buku III bagian 10 sampai bagian 13, Aristoteles mengulas pertimbangan-pertimbangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang kekuasaan.

Telah diketahui, hukum adalah sumber kekuasaan tertinggi. Segala proses politik tetap harus berdasarkan hukum yang telah disepakati. Permasalahan yang kemudian muncul adalah tentang siapa yang berhak menetapkan hukum. Siapa yang pantas membuat ketetapan hukum. Apakah hukum akan ditetapkan oleh satu orang terpilih dalam monarki, apakah beberapa orang pilihan dalam aristokrasi ataukah hukum dibuat berdasarkan keputusan bersama dalam politeia.

Proses pembuatan ketetapan hukum berdasarkan bentuk-bentuk pemerintahan terdapat kelemahan-kelemahan pada masing-masingnya. Monarki mengandaikan hukum ditentukan oleh seorang terbaik dan terpilih, hal ini walaupun ideal akan tetapi kecil kemungkinan terjadi. Sangat riskan membayangkan ada seorang terunggul dan terpilih di mana ia kemudian mengatur seluruh persoalan politik kenegaraan termasuk penetapan hukum. Jika seandainya ada maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang ia hasilkan akan dipengaruhi oleh situasi pribadinya sendiri, padahal kepentingan umum harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan warga negara secara keseluruhan. Menyadari akan hal itu, pada bentuk monarki dikhawatirkan terjadi peluang penyimpangan yakni penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang sehingga bentuk pemerintahan rentan berubah menjadi tyran.

Begitupun juga dalam aristokrasi, hukum ditentukan atas kesepakatan yang dihasilkan beberapa orang pilihan. Aristoteles menyatakan tidak mungkin beberapa orang memiliki kemampuan yang sama secara mutlak, diantara mereka pasti terdapat perbedaan kemampuan dalam beberapa hal. Dan dikhawatirkan terjadi kesamaan indikasi sebagaimana yang ada dalam monarki. Belum lagi jika

mereka yang terpilih, terpengaruh oleh pertimbangan kepentingan kelompoknya masing-masing dalam proses pengambilan kesepakatan. Jika itu terjadi, maka kesepakatan justru akan semakin menjauhkan diri dari tujuan tertinggi negara itu sendiri.

Dalam bentuk politeia, Aristoteles memiliki kecenderungan untuk memandangnya sebagai yang lebih baik, karena pertimbangan jumlah pembuat keputusan. Walaupun tetap diakui terdapat kelemahan di dalamnya. Semakin besar jumlah orang yang berhak memberikan usulannya dalam rangka membuat kesepakatan maka semakin lengkap pula aspirasi yang masuk sebagai pertimbangan. Pertimbangan terkait dengan kepentingan warga negara secara umum seperti yang diharapkan.

Penyelewengan kecil kemungkinan terjadi. Akan tetapi di sisi lain, jika keputusan yang dihasilkan hanya semata-mata suara terbanyak, maka pertimbangan kebenaran dan kebaikan atas keputusan juga tidak dapat dijamin kualitasnya. Misalnya, jika dalam pengambilan suara terbanyak terdapat sekelompok besar warga negara yang miskin serta kurang berpendidikan dan tentunya mereka berpendapat sesuai dengan kepentingan serta pengetahuannya kemudian di lain pihak terdapat sekelompok kecil warga yang berpendidikan atau kaya, maka yang akan terjadi adalah keputusan yang didasarkan bukan atas pertimbangan kebenaran dan kebaikan akan tetapi berdasarkan kepentingan warga negara terbanyak. Dengan demikian, yang terjadi kemudian adalah penyimpangan dari bentuk pemerintahan politeia, yakni bentuk demokrasi.

Aristoteles menyetujui asumsi bahwa yang berhak membuat keputusan adalah mereka yang lebih mampu dalam beberapa hal dari pada mereka lainnya yang tidak mampu. Artinya, aspek kemampuan dalam hal pengetahuan, ekonomi, ataupun kekuatan fisik mendapat pertimbangan lebih dari pada lainnya. Dengan catatan hal itu harus tetap diimbangi dengan aspek jumlah. Maksudnya, semakin banyak jumlah orang yang bertugas membuat kesepakatan tentang hukum maka semakin baik pula kesepakatan yang dihasilkan.

Dengan demikian langkah terbaik untuk menentukan siapa yang berhak membuat serta meletakkan ketentuan hukum adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam beberapa hal dengan didukung oleh jumlah pembuat keputusan relatif banyak. Pemahaman ini dapat dilihat dalam kesimpulan Aristoteles, bahwa kekuasaan bukan berada di tangan pendeta, raja, atau senator, akan tetapi kekuasaan harus ada di tangan majelis pemerintah, majelis peradilan, atau majelis kenegaraan lainnya. Di mana raja, pendeta, atau senator hanya salah satu anggota dari keseluruhan sistem majelis.

3. Penyelenggaraan Kekuasaan

Aristoteles tetap menganggap negara sebagai organisasi terbesar yang memegang amanat mencapai tujuan tertinggi. Sebagai jenjang tertinggi dari keseluruhan persekutuan hidup politis (*he koinonia politike*) maka negara terdiri dari bagian-bagian. Bagian-bagian itu ialah keluarga yang berkumpul menjadi desa dan kumpulan desa-desa menjadi negara.

Bagian terkecil dari negara adalah keluarga. Bagian ini memiliki bentuk paling riil karena keluarga adalah kenyataan dasar dalam kehidupan manusia. Ada

atau tidak negara, keluarga tetap memiliki keberadaan. Menyadari hal itu, Aristoteles mengadopsi kegiatan hubungan dalam keluarga sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan dalam negara.

Model penyelenggaraan kekuasaan mengacu pada tiga bentuk model hubungan dalam keluarga;

- a) Hubungan antar tuan dan budak;
- b) Hubungan antara suami dan isteri; dan
- c) Hubungan antara ayah dan anak-anak.

Dari ketiga model penyelenggaraan kekuasaan di atas, penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dilakukan melalui model hubungan:

- a) *Pertuanan* (*mastership//despotikē//of a master*), hubungan antara tuan dan budak.
- b) *Matrimonial* (*gamikē*) untuk hubungan suami dan isteri.
- c) *Paternalistik* (*teknopoiētikē*), untuk hubungan ayah dan anak-anaknya.

Penyelenggaraan kekuasaan atas dasar hubungan tuan dan budak tidak cocok bagi tujuan negara yang baik. Jika dianggap, pemegang kekuasaan adalah tuan sedangkan budak sebagai yang dikuasai, yakni warga negara umumnya, maka warga negara tidak memiliki kebebasan apapun. Seluruh persoalan akan disandarkan secara mutlak kepada kepentingan pemegang kekuasaan. Warga negara tidak memiliki hak apapun. Hubungan antara tuan dan budak adalah hubungan satu arah, di mana garis komunikasi tidak ada. Hubungan tuan dan budak sama halnya dengan hubungan manusia dan binatang peliharaannya. Sehingga menurut model ini, negara hanya kepunyaan pemegang kekuasaan.

Kesimpulannya, model penyelenggaraan semacam itu tidak layak untuk digunakan sebagai pedoman, karena model kekuasaan ini bersifat *despotis* (pengaturan paksa).

Penyelenggaraan kekuasaan model hubungan suami dan isteri menurut Aristoteles adalah model paling pas bagi sebuah negara. Jika diandaikan suami adalah pemegang kekuasaan dan isteri adalah warga negara, maka hubungan suami dengan isteri adalah proporsional. Suami memiliki kekuasaan atas isteri akan tetapi tidak mutlak. Begitupun juga penguasa memiliki hak berkuasa atas warga negara akan tetapi tidak mutlak. Artinya warga negara atau si isteri tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan memberi pertimbangan atas keputusan yang ditentukan oleh penguasa atau sang suami. Hubungan suami-isteri adalah hubungan kerjasama kesetaraan tetapi tetap terdapat perbedaan fungsi dan tanggung jawab berdasarkan hukum keluarga. Suami tetap sebagai kepala keluarga sedangkan isteri adalah yang mendampingi suami dalam setiap hal yang menyangkut kepentingan keluarga. Isteri bukan pihak lain sebagaimana budak yang tidak memiliki kebebasan sama sekali. Isteri memiliki kebebasan untuk menggunakan hak-haknya, akan tetapi dalam kebebasan isteri masih terdapat tuntutan untuk patuh terhadap suaminya. Arti kebebasan bagi warga negara masih mengandung nilai kepatuhan terhadap pemegang kekuasaan.

Penyelenggaraan kekuasaan dengan model hubungan antara ayah dan anak, Aristoteles memandang model ini tidak jauh berbeda dengan model hubungan antara suami dan isteri. Hanya saja kepatuhan anak kepada ayahnya memuat tuntutan yang lebih tinggi dari pada isteri kepada suaminya. Anak dilahirkan oleh

orang tua, maka secara kodrat ia harus menunjukkan sikap kepatuhan yang besar terhadap orang tuanya. Selanjutnya dalam hal kedewasaan, antara anak dan orang tua memiliki perbedaan yang mencolok. Seorang anak akan terpengaruh berdasarkan pertimbangan kemampuan memandang sesuatu yang dimiliki orang tuanya. Artinya orang tua secara umum lebih mempunyai pertimbangan yang matang dari pada anak. Berbeda dengan isteri, karena ia relatif tidak jauh peredaan dengan suami dalam hal kedewasaan.

Posisi warga negara di depan penguasa harus tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan dikarenakan secara politis posisi mereka diatur oleh penguasa. Akan tetapi, jika tingkat ketergantungan menjadi berlebihan, maka ketergantungan akan berubah menjadi posisi kehilangan kebebasan. Dan hal itu berarti identik dengan model tuan dan budak. Karena itu istilah *paternalistik* atau kebapakan biasa dipahami sebagai sikap ketergantungan besar pihak satu terhadap pihak lainnya. Khusus dalam persoalan hubungan ayah dan anak ini, Aristoteles menyebutnya sebagai hubungan monarkial, di mana warga negara punya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemegang kekuasaan.

Aristoteles memandang penyelenggaraan kekuasaan paling baik adalah model hubungan antara suami dan isteri. Antara suami dan isteri memiliki fungsi yang berbeda akan tetapi memiliki kesamaan posisi secara hukum. Sehingga pola hubungan antara suami dan isteri tidak memiliki kesenjangan yang dalam. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang selalu dilandasi oleh kesadaran akan kesetaraan derajat dan kebebasan.

C. Dialog Dengan Bentuk Kekuasaan Lainnya

1. Konsep Kekuasaan Dalam Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara eksplisit dan orisinal, istilah politik tidak terdapat dalam ajaran

Islam. Dalam kosakata ajaran Islam tidak diketahui terdapat term politik. Istilah ini mengiringi bukti sejarah kebudayaan Islam sejak kira-kira nabi Muhammad mulai memimpin negara Madinah pada awal perkembangan Islam. Politik diakomodasi oleh Islam dengan sebuah alasan, jika term politik mengakar dalam kehidupan manusia, sedangkan Islam sebagai agama yang memiliki sumber ajaran yang sifatnya global dan komprehensif bagi semuanya, maka Islam jelas mengakui adanya hal itu. Islam memuat segala matra kehidupan manusia termasuk politik.

Dalam Islam, seluruh orientasi dan tujuan kehidupan manusia harus selalu disesuaikan dengan ajaran itu sendiri. Yang boleh dan yang terlarang, yang benar dan yang salah, ataupun yang baik dan yang buruk, semuanya telah mendapat standar nilai yang telah ditentukan. Sehingga kekuasaan sendiri dalam pemahaman Islam harus tetap bersumber dari Tuhan yakni Allah. Masalahnya adalah bagaimana hubungan pemahaman yang ada dalam Islam dengan persoalan kekuasaan seperti pandangan Aristoteles? Selanjutnya hubungan keduanya akan dibahas berdasarkan klasifikasi kekuasaan sebagaimana di atas, yakni tentang sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan dalam negara, serta penyelenggaraan kekuasaan.

Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan politik muslim menyatakan bahwa kekuasaan dalam pengertiannya adalah dominasi dan memerintah atas dasar

kekerasan.² Kekerasan di sini tidak selalu diartikan negatif. Setiap orang yang telah mencapai tingkat kekuasaan tertentu, maka secara alamiah ia akan tidak puas dan berusaha mencapai tingkat kekuasaan lebih tinggi lagi. Sampai pada saatnya ia mencapai tingkat kekuasaan tertinggi, yakni kekuasaan negara. Hal yang demikian itu bagi Ibnu Khaldun adalah hukum Tuhan, karenanya manusia yang selalu ingin mencapai tingkat kekuasaan lebih tinggi dari apa yang telah ia capai adalah bimbingan hukum Tuhan. Dengan demikian dalam Islam, walaupun selalu mencerminkan indikasi kekerasan, kekuasaan tetap dalam koridor ijin dan ridlo Tuhan.

Untuk bagian pertama tentang sumber kekuasaan, di sana diketahui secara pasti bahwa Aristoteles memilih hukum sebagai satu-satunya sumber kekuasaan. Dengan sebuah asumsi bahwa kekuasaan adalah predikat yang rentan terkontaminasi kepentingan-kepentingan pelakunya sehingga ia menjadi relatif tidak terkontrol jika diserahkan secara mutlak pada personifikasi manusia dengan segala subyektivitasnya. Tingkat relativitas penggunaan kekuasaan dan tingkat subyektivitas manusia yang cenderung untuk berbuat sesuai dengan kepentingannya itu akan dapat direduksi sedemikian rupa dengan hukum. Hukum adalah standar pasti yang tidak dapat dirubah menurut kepentingan tertentu. Hukum dibentuk bukan untuk dirinya sendiri akan tetapi bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud.

Islam memiliki pandangan yang sama berkaitan dengan hukum. Jika dipahami bahwa hukum adalah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia,

²A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, 131.

maka Islam-pun adalah hukum. Karena ia diturunkan untuk membimbing sekaligus mengatur cara hidup manusia. Karenanya pada beberapa pandangan politik dalam filsafat Islam, hukum Tuhan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh manusia untuk menuju kesempurnaan, yakni tujuan manusia bernegara itu sendiri.³

Ibnu Khladun sendiri mengakui bahwa pada saat-saat tertentu dalam mengemban amanat kekuasaan, manusia membutuhkan perangkat peraturan yang berfungsi sebagai peringatan pada waktu kekuasaan sudah mulai dipergunakan di luar batas yang dimaksudkan. Peraturan tersebut dapat berupa norma, hukum, dan undang-undang. Baik bersifat konstitusional yang mengikat secara ketat ataupun secara moral yang hanya memberikan penilaian berkaitan dengan kehormatan, nama baik, dan prestise.⁴

Sampai di sini, persoalan hukum sebagai sumber kekuasaan, antara pemahaman Aristoteles dan pemahaman Islam tidak terdapat perbedaan mendasar. Keduanya sama-sama setuju jika hukum diartikan sebagai kekuatan yang mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan kekuasaannya secara politis. Dalam Islam dipahami, jika dunia politik adalah termasuk satu aspek kehidupan manusia maka dunia politik juga termasuk wilayah yang diatur oleh hukum Tuhan.

³Menurut Al-Farabi dan Ibn-Bajjah, seorang manusia tidak akan mencapai kesempurnaan tujuan jika tidak melalui bimbingan imam atau nabi (hukum Tuhan/syari'ah). Lihat, *Para Filosof Muslim*, M.M. Syarif, et.al. (Bandung: Mizan, 1996), 166.

⁴A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, 141.

Persoalan selanjutnya berkaitan dengan proses penetapan hukum. Tidak dapat diingkari, dalam proposisi yang dikemukakan oleh Aristoteles masih terdapat kebingungan mendasar sebelum akhirnya ia menyimpulkan bahwa penentuan hukum seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan tetap memperhatikan pertimbangan jumlah relatif banyak orang yang memutuskannya. Kebingungan tersebut berakar dari perbedaan kondisi warga negara berdasarkan kemampuannya, baik dalam hal kekuatan fisik, pengetahuan, maupun ekonomi. Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan hukum, maka masing-masing kelompok akan menentukan hukum sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing.

Islam tetap memandang bahwa perbedaan kondisi tersebut ada dalam bangunan sosial, akan tetapi kesemuanya sama kedudukannya menurut ajaran, dan hanya kualitas spiritual yang membedakannya. Setiap kelompok masih tetap memiliki kewajiban untuk tunduk kepada ajaran. Artinya setiap kelompok dalam masyarakat, bagaimanapun bentuknya tidak memiliki hak untuk menentukan hukum sendiri. Dengan kata lain, hukum dalam Islam telah ditentukan oleh Sang Penguasa Yang Maha Esa, Allah SWT. Hal ini dengan jelas telah menyelesaikan persoalan yang dibingungkan oleh Aristoteles. Jika pada waktu itu belum terdapat perangkat kegamaan yang memadai untuk dijadikan bahan pertimbangan Aristoteles, maka kebingungan dalam hal perbedaan posisi sosial sangat mungkin terjadi. Seorang raja filosof (*king philosopher*) yang dianggap memiliki kemungkinan kecil terjadi tersebut bisa juga dimungkinkan karena Aristoteles sendiri belum menemukan jejak agama yang memiliki Sang Penguasa Yang Maha

Bijak. Seperti halnya kebingungan atas kasus perbedaan kelas yang diperbincangkan oleh Karl Marx, meskipun thema yang ditekankan berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh Aristoteles.⁵ Hanya saja menurut Marx, agama justru bertanggung jawab sebagai penghalang hukum-hukum duniawi.

Berikutnya dalam persoalan siapa yang memegang kekuasaan, secara eksplisit dalam Islam tidak ditentukan siapa yang berhak berkuasa dalam negara. Dalam Islam tidak dibahas bentuk-bentuk pemerintahan, hanya saja pada awal kebudayaan Islam, nabi Muhammad SAW pernah menjabat sebagai kepala negara, dan dalam hal ini berkesesuaian dengan monarki dalam Aristoteles. Pada persoalan ini, baik Islam maupun Aristoteles sendiri tidak menganggap penting bentuk pemerintahan mana yang paling pantas dalam mengemban amanat kekuasaan. Yang terpenting adalah siapapun yang menjadi penguasa, apakah monarki, aristokrasi, ataupun politeia, semua harus tunduk kepada hukum yang telah disepakati. Hal ini tidak dapat dipahami bertentangan dengan Islam, karena yang terpenting dalam Islam adalah komitmen dan konsisten terhadap ajaran atau hukum Tuhan. Artinya, Islam dan Aristoteles tetap mengembalikan persoalan pemegang kekuasaan terhadap otoritas sumber kekuasaan itu sendiri. Dalam Aristoteles berupa hukum konstitusional maka dalam Islam berupa hukum ajaran agama.

⁵Pada kasus Marx, persoalan tidak pada perdebatan tentang bentuk pemerintahan ataupun bagaimana sebuah hukum ditetapkan, akan tetapi proses perkembangan dialektis antar kelas (borjuasi dan proletariat) secara kontradiktif dan merusak. Hal tersebut pada dasarnya sama dengan awal kebingungan Aristoteles tentang perbedaan kondisi warga negara. Lihat, Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna*, terj. M. Nur Mufid (Bandung: Mizan, 1994), 187.

Menganai penyelenggaraan kekuasaan, seperti sebelumnya tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hal itu. Dalam Islam hanya dikenal konsep keadilan, di mana adil berarti menentukan sesuatu pada tempatnya, karenanya Adil dilawankan dengan zalim, yakni menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam Islam, hubungan antara manusia dengan manusia tidak berbeda di hadapan Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengakui adanya perbedaan posisi keutamaan yang akhirnya mendorong adanya perbedaan cara bersikap. Demikian juga menurut tinjauan kenegaraan ataupun politik, hubungan antara penguasa dan warga negara telah ditentukan.

Seorang warga negara harus taat kepada pemegang kekuasaan atau pemerintah (*khalifah*), sepanjang pemerintahan tersebut masih di dalam hukum Allah. Meskipun dalam Islam dikenal ketentuan cara berhubungan antara seorang isteri kepada suaminya atau ketentuan seorang anak kepada orang tuanya, akan tetapi hubungan itu tidak semata-mata didasarkan atas alasan kemanusiaan. Seluruh pola hubungan manusia dalam Islam tetap kembali kepada bentuk ketundukan kepada Tuhan.

Aristoteles mendasarkan penyelenggaraan kekuasaan dari pelajaran yang di dapat dalam sebuah keluarga, sedangkan dalam Islam penyelenggaraan kekuasaan telah ditentukan oleh Tuhan bukan atas dasar model yang terdapat dalam keluarga, akan tetapi memang telah ada ketentuan bagaimana seorang pemegang kekuasaan (*khalifah*) bersikap kepada warga negara (*adil*). Sebaliknya juga, dalam Islam telah ditentukan pula bagaimana bentuk kepatuhan warga negara terhadap *khalifah* (*taat*).

Dari uraian tentang ketiga pembagian kekuasaan di atas dapat dimengerti bahwa Islam memiliki keunggulan dalam hal ketetapan hukum serta contoh yang mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya ataupun model hubungan antara hamba dengan hamba. Di dalam aturan global tersebut sekaligus telah merangkum ketentuan bagaimana berhubungan secara politis, bahkan bagaimana mengemban amanat kekuasaan.

2. Kekuasaan Dalam Konteks Keindonesiaan.

Konsep kekuasaan pada taraf pemahaman sebenarnya telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Asumsi melatari pemahaman bahwa konsep kekuasaan yang dibicarakan dalam teori politik modern telah jauh meninggalkan dasar-dasar teori politik lama, terutama dalam hal kedalaman pemaknaan, ekstensifitas obyek, serta intensifitas kajiannya. Misalnya, pemahaman kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber, yakni "*The rule of men over men based on the means of legitimate, that is a allegedly legitimate, violence*,"⁶ Kekuasaan mendapat tambahan pemahaman sebagai hasrat menguasai yang identik dengan pemaksaan. Meskipun dalam pemahaman Aristoteles, istilah pemaksaan dengan jalan kekerasan pernah disinggung, akan tetapi belum mendapat perhatian serius. Pemaksaan menurut Aristoteles hanya efek samping dari kekuasaan, sedangkan dalam pengertian modern, pemaksaan adalah aspek dominan dalam setiap bentuk kekuasaan. Sehingga masih pada halaman yang sama C. Wright Mills

⁶Dikutip dari, *Jika Rakyat Berkuasa*, Tim Maula, et.al. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999),

mengungkapkan, *"All politics is a struggle for power; the ultimate kind of power is violence"*.

Demikian pula halnya, pengertian demokrasi yang saat sekarang tidak habis-habisnya diperbincangkan jauh berbeda dengan pemahaman Aristoteles. Aristoteles memandang demokrasi adalah bentuk menyeleweng dari pemerintahan politeia. Dengan asumsi demokrasi adalah pemerintahan rakyat, sedangkan rakyat secara umum adalah miskin, dan pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang miskin akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, yakni untuk memperkaya diri. Jika sebuah negara hanya bertujuan untuk kekayaan dan bukan kebaikan, maka negara tersebut bukan termasuk negara yang baik.

Demokrasi, menurut pengertian modern adalah pemerintahan yang terletak atas kekuasaan rakyat, prosesnya dilakukan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam pengertian modern, demokrasi memiliki konotasi positif sebagai bentuk pemerintahan paling ideal dan paling dapat menjamin kebaikan bersama. Karena seluruh tujuan akhir ditujukan kepada kepentingan rakyat.

Indonesia adalah negara berbentuk republik yang memilih bentuk pemerintahan demokrasi, tepatnya demokrasi Pancasila. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang secara aktual dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang berada dalam lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses pemerintahan, rakyat memilih kepala negara (presiden) melalui pemilihan umum melalui pilihan partai politik. Hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum dijadikan acuan utama dalam Sidang Umum Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR. Sedangkan DPR memiliki kedudukan setingkat dengan presiden, dan salah satu fungsinya adalah mengadakan pengawasan atas presiden (pemerintah).

Konsep kekuasaan yang ada dan berkembang di Indonesia tidak dapat disamakan dengan konsep kekuasaan dalam pandangan Islam. Bagian-bagian institusi kenegaraan yang sudah jelas dan prosesnya telah diatur sedemikian rupa menunjukkan bahwa perjalanan kekuasaan di Indonesia telah direncanakan demi kepentingan kesejahteraan umum yang dituju, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Persoalan yang menyangkut keterkaitan antara kenegaraan resmi Indonesia dengan doktrin keagamaan rakyatnya inilah yang biasa menjadi persoalan krusial seputar pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, masalah seperti ini mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, dengan alasan demi kesatuan visi dan komitmen kebangsaan. Apakah Indonesia adalah negara yang lahir murni dari keinginan yang sama dari beberapa manusia yang berbeda. Apakah Indonesia terbentuk atas dasar satu usaha dari sekelompok orang yang sama.

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan modern, Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga khusus yang juga setaraf dengan lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sebagaimana lembaga lainnya, fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga ini telah diatur dalam tata laksana kenegaraan sesuai dengan acuan

program pembangunan melalui GBHN dan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya seluruh persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup rakyat banyak diatur berdasarkan hukum-hukum tertulis (konstitusi). Gambaran ini sama seperti konsepsi Aristoteles tentang fungsi hukum sebagai sumber kekuasaan. Hukum tertinggi negara Indonesia adalah UUD 1945. Dengan demikian seluruh hukum-hukum lain yang berbentuk keputusan MPR, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau lainnya harus tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sampai di sini konsep hukum yang dilaksanakan di Indonesia serupa dengan Aristoteles.

Secara filosofis, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat melalui wakilnya dalam DPR, akan tetapi dalam praktek pemerintahan, kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden, dan lembaga pemerintahan lainnya. Bila dikaitkan dengan pandangan Aristoteles tentang pemegang kekuasaan, Indonesia termasuk bentuk negara politeia, di mana pemegang kekuasaan terletak di tangan banyak orang. Hanya saja banyak orang tersebut diwakili oleh lembaga perwakilan.

Pada masa modern, yang di antaranya dalam pandangan *Thomas Hobbes* hingga *Juergen Habermas*, istilah kekuasaan tidak lagi diandaikan sebagai kekuatan represif yang hanya terletak pada satu tangan pihak sebagai konsentrasi. Sebagaimana halnya yang dipahami pada Aristoteles, bahwa kekuasaan adalah wewenang pemegang kekuasaan yang dapat saja terjadi tanpa persetujuan mereka

yang dikuasai. Oleh karena itu, dalam sistem politik Indonesia yang merujuk pada pandangan modern, istilah pemegang kekuasaan biasa dibahasakan sebagai aparaturnegara, yakni abdi rakyat atau abdi negara.

Tugas dan wewenang pemerintah sebagai penguasa dipandang hanya sebagai pelaku yang mengatur negara. Meskipun akhirnya dalam pengaturan tersebut muncul ekseseks kekuasaan yang bersifat memaksa, akan tetapi pemaksaan itu sendiri dilandasi oleh kesepakatan legitimasi kontrak-masyarakat.⁷ Artinya, penguasa memang dipilih oleh mereka yang dikuasai untuk kemudian mendapat wewenang kekuasaan untuk mengatur keseluruhan mereka. Dan pemegang kekuasaan, pada saat-saat tertentu memiliki hak untuk menggunakan kekuasaannya untuk memaksa secara represif.

Legitimasi yang dimiliki penguasa untuk mempergunakan kekuasaannya adalah legitimasi etis dalam dunia berpolitik. Artinya, walaupun mereka secara riil memiliki kekuatan memaksa dalam rangka meneguhkan pemerintahannya akan tetapi mereka dibatasi oleh kode moral kekuasaan yang ada.⁸ Maka, sebagaimana keterangan yang didapat dari pemahaman Aristoteles tentang ukuran kekuasaan pemerintah, bahwa kekuasaan yang mereka miliki tidak absolut. Dengan demikian berarti kekuasaan mereka terbatas oleh pilihan yang dikuasai, batasan etika, serta pertimbangan-pertimbangan moralitas.

Kondisi semacam ini tepat diajukan dalam rangka mengidentifikasi kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia. Apabila dirasa kekuasaan telah

⁷Tim Maula, et.al., *Jika Rakyat Berkuasa*, 61.

⁸Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1987), 30.

begitu tidak terkendali, baik dengan bukti kekerasan pemerintah secara represif terhadap rakyat, ataupun bentuk penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, maka harus dikembalikan kepada beban etis serta hukum-hukum moral yang ada selain secara pasti terdapat hukum yang secara konstitusional memang diperuntukkan mengendalikan distribusi kekuasaan negara.

Antonio Gramsci, seorang intelektual politik Italia yang tenar dengan teori hegemoni, mengemukakan pandangannya tentang kekuasaan. Bagi dia, kekuasaan akan tetap ada jika terus didukung oleh dua perangkat; *pertama*, pemaksaan di mana perangkat ini biasa dipergunakan oleh pemerintah, militer, hukum, atau pranata negara (state) lainnya; sedangkan yang *kedua*, bujukan di mana perangkat ini biasa dipergunakan oleh pranata kehidupan swasta, seperti dalam wilayah agama, pendidikan, kesenian, ataupun keluarga.⁹ Kedua perangkat kekuasaan yang dipergunakan sebagai media hegemoni tersebut mematahkan pandangan yang menganggap kekuasaan harus selalu bersifat kekerasan atau represif dan selalu harus dari pemegang kekuasaan formal, pemerintah. Kedua perangkat kekuasaan yang digambarkan oleh Gramsci tersebut dirasakan terjadi di Indonesia.

Persoalan penyelenggaraan kekuasaan, di Indonesia menganut sistem kenegaraan yang juga menganut pranata tata negara modern, dengan indikasi seluruh prosedur kerja kenegaraan yang menghubungkan antara pemegang kekuasaan yakni pemerintah dengan rakyat atau yang dikuasai telah ditentukan menurut undang-undang melalui bingkai birokrasi. Penyelenggaraan kekuasaan di

⁹Tim Maula, et.al, *Jika Rakyat Berkuasa*, 65.

Indonesia, jika disesuaikan dengan model yang ditawarkan oleh Aristoteles, maka lebih dekat pada model hubungan antara suami dan isteri. Artinya, pemerintah tetap memiliki wewenang menggunakan kekuasaan atas rakyat, akan tetapi posisi rakyat juga cukup kuat untuk ikut mengawasi proses pemerintahan.

Pada dasarnya, teori kekuasaan yang dikenal di Indonesia tidak jauh melenceng dengan apa yang telah dipahami oleh Aristoteles. Hanya saja pengaruh perbedaan waktu dan kondisi kebudayaan yang mengakibatkan perkembangan pemahaman memaksa timbulnya pertimbangan-pertimbangan lain. Karenanya, tidak salah jika disinyalir bahwa dasar politik yang telah digulirkan Aristoteles pada sekitar 340 tahun sebelum masehi tersebut masih tetap menunjukkan relevansinya bahkan untuk masa ini.

Satu hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam konstelasi perpolitikan Indonesia adalah tentang diskursus demokratisasi. Aristoteles telah mengingatkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menyeleweng, yakni dari politeia. Penyelewengan ini disebabkan oleh perubahan tujuan utama sebuah negara yang pada awalnya ingin mencapai kebaikan tertinggi akan tetapi pada bentuk demokrasi negara hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan sekelompok orang tertentu saja, yakni kelompok miskin yang berusaha untuk mendapatkan kekayaan.

Sebagai negara dunia ketiga, Indonesia tidak dapat lepas dari persoalan-persoalan ekonomi. Problem kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kesejahteraan rakyat yang minim selalu menjadi persoalan utama bangsa. Kondisi semacam itu tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya asumsi

sebagaimana dipahami oleh Aristoteles. Dengan kata lain, proses penyelenggaraan kekuasaan yang telah diatur sedemikian rupa bisa saja akan porak-poranda karena alasan ketidakberhasilan pemerintah dalam hal bangunan ekonomi. Pada akhirnya hak pengawasan yang dimiliki oleh rakyat kepada pemerintah melalui wakilnya di DPR selalu didasari oleh pertimbangan ekonomi sehingga secara otomatis mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah menciptakan kebaikan bagi semua, tujuan negara tidak selalu berorientasi kekayaan (ekonomis). Bagaimanapun juga aspek ekonomi adalah salah satu dari sekian aspek yang ada dalam tata kehidupan manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Paparan pada bab-bab terdahulu merupakan rangkaian alur pemikiran yang ditujukan untuk menjelaskan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari bab ini berisi pandangan akhir sesuai dengan tahap perumusan yang telah ada. Dan dengan demikian, kesimpulan berisi pandangan akhir tentang konsep kekuasaan Aristoteles; dan pokok pikiran mengenai deskripsi fenomenologis terhadap konsep kekuasaan tersebut.

Pemahaman yang dapat disarikan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pertama, kekuasaan dalam negara menurut penjelasan yang terdapat dalam rangkaian pemikiran Aristoteles tidak mengemukakan uraian bahasa atau istilah dalam sebuah pembahasan secara mendasar. Kekuasaan dalam negara tidak dibahas dalam bab-bab secara terpisah sehingga untuk mengetahuinya harus melalui pembacaan pada seluruh pikiran politiknya. Aristoteles mengemukakan kekuasaan dalam tiga klasifikasi pemahaman yakni; sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, dan penyelenggaraan kekuasaan. Sumber kekuasaan ditentukan oleh hukum sebagai penguasa tertinggi, pemegang kekuasaan disesuaikan dengan bentuk pemerintahan, dan penyelenggaraan kekuasaan mengambil contoh dari manajemen keluarga.

Kedua, deskripsi fenomenologis terhadap konsep kekuasaan dalam filsafat politik Aristoteles mengambil bagian menggambarkan secara murni dan orisinal serta dengan menambahkan landasan normatif pengetahuan tentang konsep tersebut. Kekuasaan dalam telaah fenomenologis adalah gambaran apa adanya dari kekuasaan yang telah diutarakan oleh Aristoteles. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah bahwa kekuasaan merupakan sebuah bahasa yang otonom untuk merepresentasikan sebuah kondisi di mana beberapa aspek kemampuan manusiawi untuk mempengaruhi dan menguasai manusia lainnya dalam kaitannya dengan perilaku politik. Landasan normatif yang dapat dipahami adalah bahwa kekuasaan merupakan perangkat penting dalam proses bernegara, sehingga nilai normatif untuk menuju kebaikan tertinggi (*the highest good*) harus diusahakan dari sana.

B. Saran

Penelitian tentang konsep kekuasaan yang telah dipaparkan secara maksimal dalam skripsi ini adalah titik awal yang diakui masih dipandang sangat kurang dalam hal penelaahan, analisa, penggalan data, serta aspek akademis lainnya. Artinya dari situ penulis ingin mengatakan bahwa pada penelitian dan kajian yang akan datang tentang thema tersebut seyogianya tetap diusahakan. Kritik atas landasan deskriptif pada pembahasan dalam skripsi ini harus selalu diadakan.

Selanjutnya, secara jujur diakui bahwa terdapat beberapa pikiran yang menarik dalam filsafat politik Aristoteles khususnya yang berkaitan dengan sub-thema kekuasaan. Pikiran tersebut adalah pikiran tentang *demokrasi*. Aristoteles

menegaskan bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari model pemerintahan *politeia*. Dengan argumentasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dengan basis kepentingan rakyat yang kesemua permasalahan ditentukan di tangan rakyat. Padahal disinyalir oleh Aristoteles bahwa secara mayoritas rakyat masih terkait dengan permasalahan ekonomi, yakni kemiskinan. Dan sebuah pemerintahan yang kebijakan-kebijakannya hanya disandarkan pada kepentingan ekonomi maka secara pasti ia tidak akan mampu mewujudkan negara ideal. Satu hal yang menarik dari pikiran ini adalah bahwa demokrasi yang selalu kita bicarakan dalam setiap thema politik dan terlanjur kita anggap sebagai landasan politik yang ideal itu ternyata menurut Aristoteles adalah contoh yang buruk bagi bentuk pemerintahan.

Pandangan Aristoteles tentang istilah demokrasi tersebut jika dikaitkan dengan pemahaman bangsa Indonesia tentang wacana demokrasi yang terjadi pada akhir-akhir ini dirasakan terdapat keterkaitan secara kontekstual. Terdapat dugaan bahwa mengapa konsep demokrasi yang berusaha diterapkan dan dikembangkan di Indonesia untuk mengusahakan negara yang ideal bagi bangsa selalu terhalang oleh berbagai persoalan yang tidak jarang menyebabkan beberapa komponen negara sebagai korban. Pertanyaannya adalah ada apa dalam pengertian demokrasi itu sendiri, dan bagaimana konteks pemahaman bernegara yang dimiliki oleh rakyat Indonesia tentang demokrasi.

Dengan demikian, apa yang ingin kami kemukakan di sini adalah bahwa telaah filosofis yang lebih mendalam tentang wacana demokrasi seyogianya diusahakan setelah melihat hasil penelitian sementara dalam skripsi ini. Artinya

telaah filosofis seharusnya mampu memberikan tawaran pengetahuan tentang

thema yang memang sangat dekat dengan bangsa indonesia, yakni tentang kondisi

perpolitikan nasional. Di samping karena setiap penelitian adalah cermin

kesetiaan manusia kepada pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail Ragi, tt, *Historical Atlas of The Religion of The World*, New York: Macmillan Publishing.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, 1994, *Falsafatuna*, terj. M. Nur Mufid, Bandung: Mizan.
- Azhar, Muhammad, 1996, *Filsafat Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagus, Lorens, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Metafisika Umum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bangash, Zafar, et.al., 1996, *In Pursuit of The Power of Islam; Major Writings of K. Siddiqui*, London: The Open Press.
- Bertens, K., 1996, *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1998, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Breiseth, Christopher, 1961, *A History of Political Theory*, New York: G.H.S.
- Brouwer, MAW., 1984, *Psikologi Fenomenologi*, Jakarta: Gramedia.
- De Boer, Th., 1978, *The Development of Husserl's Thought*, terj. Martinus Nijhoff, London: tp.
- Deligaauw, Bernard, 1988, *Filsafat Abad 20*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhavamony, Mariasusai, 1995, *Fenomenologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius.
- Workman, John Rowe, 1993, *Encyclopaedia Americana*, vol. 2, New york: Grolier Incorporated.
- Suseno, Franz Magnis, 1997, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1987, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Harre, Rom dan Lamb, Roger, 1996, *Ensiklopedi Psikologi*, terj. Danuyasa Asih Wardji, Jakarta: Arcan.
- Hasan, Fuad, 1996, *Pengantar Filsafat Barat*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hasting, James, et. al., tt, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Volume I, New York: Charles Scribner's Sons.

- Jowet, William, 1952, *Great Books of The Western World*, vol. IX, Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Maula, Tim, et.al, 1999, *Jika Rakyat Berkuasa*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Morehead, AH., et.al., 1965, *Illustrated World Encyclopaedia*, Vol. 2: Am-Az, New York: Bobley Publishing.
- Poedjawijatna, 1986, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rapar, JH., 1993, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schmid, Von, 1962, *Ahli-ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terj. R. Wiratno, Jakarta: Pembangunan.
- Scruton, Roger, 1995, *A Short History of Modern Philosophy*, New York: Routledge.
- Selligman, Edwin, et.al, tt, *Encyclopaedia of The Social Sciences*, Vol. 1, New York: Macmillan Company.
- Siswanto, Joko, 1998, *Sistem-Sistem Metafisika Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith, Linda dan Raeper, William, 2000, *Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*, terj. P. Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarif, M.M., et.al, 1996, *Para Filosof Muslim*, Bandung: Mizan.
- Tafsir, Ahmad, 1990, *Filsafat Umum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Taylor, AE., dan Ross, WD., 1991, *Ensiklopedi Umum*, ed. Pringgodigdo, Yogyakarta: Kanisius.
- Turner, Merle B., 1967, *Psychology and the Philosophy of Science*, New York: Appleton-Century-Crofts.
- Zainuddin, A. Rahman, 1992, *Kekuasaan Dan Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.